

**PELAKSANAAN GERAKAN TERPADU  
PENGENTASAN KEMISKINAN (Gerdu-Taskin)  
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**

**(Suatu Studi pada Desa Plandirejo  
Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MAFRIKHATUL K. NISA  
NIM. 0410310076**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DAERAH  
2008**



# MOTTO

**Tidak Ada daya dan upaya kecuali dengan izin ALLAH.  
Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan.  
ALLAH akan menjadikan setelah kesusahan ada  
kemudahan. Cukuplah ALLAH saja bagi kami, Dia yang  
menjadi sebaik-baik Penolong... ALLAH Tuhanku, aku  
tidak menyekutukan-Mu dengan apapun. Maka  
kesabaran yang indah (adalah kesabaranku). (QS. Yusuf  
12 : 18)**

**Nothing Is Impossible,  
Everything Is Possible  
When I Believe In Allah**

**" You Can If You Think  
You Can"  
(Norman V Peale)**

*Karya kecil ini khusus kupersembahkan untuk  
Ayah,,, Ibu,,, dan adek,,  
Yang telah lama menunggu karya ini ada...*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Gerdu- Taskin) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi pada Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kabupaten Blitar).

Disusun oleh : Mafrikhatul K. Nisa

NIM : 0410310076

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

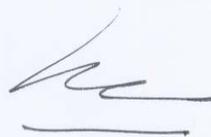
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 27 MAR 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. DR. Sumartono, MS.

NIP. 131 131 029



Drs. Riyanto, M.Hum.

NIP. 131 573 950

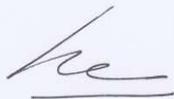
## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 03 Juni 2008  
Jam : 08:00 – 09:00  
Skripsi atas nama : Mafrikhatul K. Nisa.  
Judul : Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI



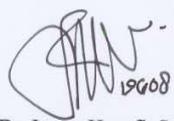
Prof. DR. Sumartono, MS

NIP. 131 131 029



Drs. Riyanto, M.Hum

NIP. 130 573 950



Dr. Imam Hanafi, S Sos, MSi, MS

NIP. 132 205 407



Drs. Moh. Rozikin, M.AP

NIP. 131 579548

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 08 Juni 2008

Mahasiswa



Nama : Mafrikhatul K. Nisa

NIM : 0410310076

## RINGKASAN

Mafrikhatul K. Nisa, 2008, **Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi pada Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar)**, Pembimbing: Prof.DR.Sumartono, MS dan Drs. Riyanto, M.Hum, 117 hal + xxxi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang cukup besar. Dampak sosial ekonomi yang terjadi meliputi peningkatan angka pengangguran, peningkatan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kerentanan struktur sosial akibat hilangnya pekerjaan dan kemampuan RTM dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam rangka mengurangi dampak krisis tersebut, pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menetapkan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sebagai salah satu program strategis dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini makin menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang peran pemerintah maupun masyarakat sebagai aktor pembangunan dalam penanganan penanggulangan kemiskinan, agar Gerdu-Taskin tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis secara kritis tentang pelaksanaan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar. Penelitian ini difokuskan pada aspek *input*, proses dan *output* (hasil) program. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan secara sistematis dan faktual. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun masyarakat telah menunjukkan kinerjanya (pada awal pelaksanaan program), dimana telah mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana desa melalui dana program Pemberdayaan lingkungan dan manusia, menyalurkan dana kepada Pokmas, dan telah mampu menggulirkan beberapa kali, tetapi jika dicermati (setelah program menginjak tahun kedua), dapat dinyatakan belum terjadi proses pemberdayaan (khususnya) bagi warga miskin, karena: (a) tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, sebab program lebih dimanfaatkan oleh kelompok yang mampu; (b) proses belajar sosial tidak berlangsung, sebab program lebih bernuansa *economic*; dan (c) lembaga lokal masyarakat (UPK) lebih berperan sebagai penyalur kredit daripada lembaga pemberdayaan.

Terkait dengan itu, saran ditekankan yaitu: 1) Para pelaku Gerdu-Taskin (tahap berikutnya) perlu mempunyai pemahaman secara baik terhadap konsep Gerdu-Taskin; 2) Perlunya sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, yaitu menuju penyadaran tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkannya secara mandiri, sehingga implementasi program dapat menjangkau kelompok sasaran. Selain itu juga harus ada sanksi yang tegas jika terjadi kemacetan angsuran; 3) Perlunya pendampingan dan dukungan dari Pemerintah Desa setempat. Diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

## SUMMARY

Mafrikhatul K. Nisa, 2008, **Implementation of Poverty Lifting Integrated Movement (Gerdu-Taskin) In Order To Empower Society (A Study at Plandirejo Village, Bakung Subdistrict, Blitar Regency)**. Supervisor : Prof. DR.Sumartono, MS. Co-Supervisor : Drs.Riyanto, M.Hum. 117 pages + xxxi.

Economic crisis that affected Indonesia since 1997, caused rather big bad impact for social, economical and political life. Social-economic impact occurred including increase in unemployment rate, increase of Poor Household (RTM) and social structure susceptibility caused by the loss of job and RTM capability in fulfilling basic needs. In order to reduce the crisis impact, East Java Province government have decided the Poverty Lifting Integrated Movement program as one of strategic programs in order to alleviate poverty rapidly. It is more and more interesting to study deeper the role of government and also society as development actors in handling poverty alleviation, so that the Gerdu-Taskin can run smoothly as expected.

This research was aimed to describe and critically analyze the implementation of Gerdu-Taskin at Plandirejo Village, Bakung Subdistrict, Blitar Regency. This research was focused on input, process, and output aspects of the program. The research was performed through qualitative approach (understanding, view, and response) of field informants that produced descriptive data, which is the illustration of systematically and factual field implementation of the program. Those data was acquired through comprehensive interview with the informants, besides documentation study, and observation.

The research result showed that, although the society has shown their performance (at beginning of the program implementation), that have already performed the development of several village infrastructure through environment and human empowerment program fund, channeled the fund to Pokmas, and have been able to rotate it several times, but if examined (after the program reached second year), could be stated that empowerment process has not occurred (especially) to poor citizens, because (a) power transfer to poor citizens has not occurred, because the program was utilized more by capable groups; (b) social learning process has not occurred, because the program was more economic in nature; and (c) local society institution (UPK) played a bigger role as credit supplier rather than empowerment institution.

Related to those, suggestions was emphasized namely: 1) The (next-phase) Gerdu-Taskin actors need to have well understanding toward the concept of Gerdu-Taskin; 2) The need for right program socialization to society, namely aimed toward awareness of the problem that is faced and the growth of spirit to solve it independently, so that program implementation can reach target groups. Moreover there should also be firm sanction if installment is halted; 3) The need of local Village government partnership and support. Village government is expected to be able to perform their tasks and functions well.

# LEMBAR PERSEMBAHAN

Perjuangan mutlak dibutuhkan dalam menjalani hidup Saya ini. Apabila ALLAH membolehkan Saya hidup tanpa hambatan, itu hanya membuat Saya lemah. Saya tidak akan sekuat ini..  
Saya memohon KEKUATAN..Dan ALLAH SWT memberi Saya kesulitan-kesulitan untuk membuat Saya tegar  
Saya memohon KEBIJAKAN..Dan ALLAH SWT memberi Saya berbagai persoalan hidup untuk diselesaikan  
Saya memohon KEMAKMURAN..Dan ALLAH SWT memberi Saya otak dan tenaga untuk bekerja  
Saya memohon KETEGUHAN HATI..Dan ALLAH SWT memberi bencana dan bahaya untuk diatasi  
Saya memohon CINTA..Dan ALLAH SWT memberi Saya orang-orang bermasalah untuk diselamatkan dan dicintai  
Ketika Saya memohon KEMURAHAN DAN KEBAIKAN HATI..Dan ALLAH SWT memberi Saya kesempatan-kesempatan yang silih berganti  
BEGITULAH CARA ALLAH SWT MEMBIMBING SAYA.....

## The Big Thank... Just and Only For ALLAH SWT...

Atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan selama ini... segala puji bagi ALLAH yang telah menghapus kesedihan dari dalam diriku. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. (QS. Yunus 10:2). Sesungguhnya selalu ada jalan keluar pada setiap kesulitan, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu berserdih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Ali Imran 3:139)

## Lalu unTuk Bapak dan IbuK Tercinta...~

Yang slalu memberi kekuatan dalam menghadapi hidup ini, yang slalu ngasih nasehat yg berarti,, yang slalu Membimbing biar nggak jadi anak yang cengeng tapi harus KUAT dan TEGAR.. yang gak ada bosennya buat ngingetin untuk slalu taat Beribadah... dan yang selaluu semua-semuanya... TERIMA KASIH buat semuanya ya buk.. Rikha minta maaf atas segala khilaf yg pernah diperbuat slama ini...tanpa dukungan dari IbuK juga, nggak akan Rikha jadi seperti ini...  
TERIMA KASIH Bapak dan Ibu...

## Buat My Precious Adek- Qu Tercinta.. M.

*Saiful Yahya,,,*

Ngowoh, My Laphly Young Brother.. Makasih buat semuanya Ya,,? Walo jadi adek, kadang-kadang kaMu yang lebih dewasa daripada Aq,, ;P Makasih buat semua dukungan kamu slama ini,,, uda nganter bolak-balik Malang-Blitar, waktu di SMU juga.. semua benar-benar berarti buat aq.. apapun yg kamu lakuin, mbakMu yang cantik ini akan slalu doain yang terbaik buat kamu.. hallah! Hehe ;>

Pokoknya kamu harus tau,,,

## To My Beloved... *Timbul Husodo, S Sos..*

Makasi buat semuanya... walopun

kita belum lama kenal, but

kehadiran pakde berarti banget

buat budhe,,, Tidak akan ada

habis-habisnya cinta ini untuk

kamu... yang slalu mendukung tanpa

henti... aku akan selalu berdoa

yang terbaik buat kamu dan buat

KITA... -♥-

DAN SIAPAKAH YANG LEBIH SESAT DARIPADA ORANG YANG MENGIKUTI HAWA NAFSUNYA DENGAN TIDAK MENDAPAT PETUNJUK DARI ALLAH SEDIKITPUN. SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MEMBERI PETUNJUK KEPADA ORANG-ORANG YANG DZALIM (AL QASHAS 50)



## BUAT The Best Friend in FIA

**Meytha** ⇒ Meytha yang cuantiik.. semua persahabatan yang Meytha tawarkan selama ini benar-benar berarti banget buat aq.. makasih telah ngasi keluarga baru di Malang.. kalo nikah ma mas arip undang-undang ya jenk.. truz **Nisa** ⇒ mbak Nisa yang cantik n baik banget ma rikha, makasih atas persahabatan ini, makasi selalu bersama-sama dibangku kuliah, moga persahabatan ini takkan pernah putus. Moga bener-bener jadi mantunya pak Minto yah,, amin,, **Diah** ⇒ teman yang bisa diandalkan saat keabisan pulza! Hehe... Di, beli pulza lagi dunk? Opo seh!!, **Martri** ⇒ Jenk.. seriusin skripsinya tu.. biar cepet lulus, moga cepet dapet jodoh yang terbaik..

Temen2 konsentrasi **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH!!!**  
Teman senasib sepenanggungan!! Hehe.. Marinta, shanti, Rika Noor, Nandia, Sinta, Detta & Titis... makasih semangadnya... **truz temen2 kelas B dulu** ⇒ Faiq, Yuda, Arna, Rahma, lusi, Latifa de el el,, semoga sukses selalu..., Makasih!!! ^ \_ ^

## Buat Warga MP 207

**Mbak Rienzz** >> kalo numpang dikamarku jangan ngompol lagi ya mbak.. **Mbak TunkZ** >> selamat atas baby-nya... jaga dan sayangi titipan karunia dari Tuhan.. moga selalu diberi kebahagiaan ama Tuhan.. **Mbak Dian** >> moga penerbangannya ke Tanjung Pinang lancar N sukses selalu ya mbak.. **Mbak Risa** >> selamat menempuh hidup baru ama om ans ya mbak, moga cepet dapt baby,hehe... **Auliya** >> makasi atas semua bantuan2nya ya!! Moga Wendik cepet turun berat badannya, biar cukup makek baju barunya, hehe.. **Mbak Shanti** >> mbak, semangadh!!! Cepet lulus ya mbak... **Mbak Erie** >> Nyonya, omelin aja anak2 kostan yang gak mau bersih-bersih. Heh!! **Made** >> De, keluar Po'o.. **Ade** >> sori ya de,, printQ juga rusak kemarin, jadi gak bisa buat praktek, sori ya.. en Saadah >> Dah, suara kamu cempreng banget loh kalo ngobrol ma safik ^ \_ ~

**Temen2 SMANTA** >> Vina, Ratih, Dona, Kountring, Ratna, Widuri, Petty, Hima, Bendot, Khrisna, Mak Tung, chandra, Pipit, Tyas, Fitra, n Edi... Kapan2 Reuni po'o???

**Keluarga di rumah** >> mbak yun, Mas yon, enik, n kakang.. makasih!!!

**Temen2 ASTRA** >> Wawan, Mukhson & Huda... Makasih... Moga Sukses... buat **JUJU...** Makasih,, kamu pernah memberikan warna-warni dalam hidupku,, wherever you leave, i can't forget you... moga ALLAH senantiasa menjagamu and menganugrahi hari-hari yang penuh tawa dan kebahagiaan untukmu ... Amin... -♥THANKS 4 ALL♥-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Gerdu-taskin, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi dan menggali informasi lebih lanjut mengenai Pelaksanaan dan Faktor yang menjadi kendala pada program Gerdu-Taskin, yang dituangkan dalam sebuah tulisan berjudul **“Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan(Gerdu-Taskin) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi pada Desa plandirejo, Kecamatan Bakung, kabupaten Blitar)”**. Sejak awal sampai dengan akhir penulisan ini, tidak sedikit bantuan yang kami terima dan karenanya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2. Bapak Prof. Drs. H. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
3. Prof.Dr.Sumartono,MS selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukannya demi kesempurnaan tulisan ini,
4. Drs.Riyanto,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukannya demi kesempurnaan tulisan ini,
5. Orang tua tercinta, adik tercinta, teman-teman terdekat, pihak UPK Gerdu-Taskin 2004 Desa Plandirejo. Bapak Gazzali Mustafa selaku Ketua UPK, Bapak Siswandi selaku Bendahara UPK, serta pihak-pihak lain yang tidak tersebut namanya disini, atas dukungan baik moral maupun spiritual bagi Penulis.

Skripsi ini merupakan bentuk sebuah ekspresi pemikiran penulis yang melihat adanya fenomena bahwa Indonesia sampai saat ini belum bisa lepas dari masalah kemiskinan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2008

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika pembahasan .....	7
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah .....	9
B. Pemberdayaan Masyarakat .....	11
1. Pengertian dan Konsep Pemberdayaan .....	11
2. Indikator Pemberdayaan .....	13
3. Tujuan dan Proses Pemberdayaan .....	16
4. Pembangunan dalam Konsep Pemberdayaan .....	19
C. Kemiskinan .....	21
1. Konsep dan Indikator Kemiskinan .....	21
2. Penyebab kemiskinan .....	26
3. Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi .....	27
4. Strategi Pemberdayaan Penduduk Miskin .....	29
D. Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan .....	31
1. Latar Belakang .....	31
2. Tujuan .....	32
3. Ketentuan Dasar pelaksanaan .....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	37
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Metode Analisis .....	43
H. Keabsahan data .....	45
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>

A. Gambaran Umum Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar .....	46
1. Luas dan Batas Wilayah .....	46
2. Wilayah Administratif .....	46
3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	47
4. Jumlah Penduduk .....	47
5. Mata Pencaharian Penduduk .....	48
B. Gambaran Umum Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar .....	49
1. Ruang lingkup .....	49
2. penetapan Lokasi dan Sasaran .....	51
3. Kaidah Pelaksanaan .....	52
4. Organisasi Pengelola Program .....	54
C. Hasil Penelitian .....	65
1. Pelaksanaan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar .....	65
a. Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan, Musyawarah Desa (Perencanaan) dan Sosialisai .....	65
b. Pelaksanaan Kegiatan Tridaya & Pencairan Dana .....	70
c. Hasil .....	81
d. Pertanggungjawaban dan Pelestarian .....	85
2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dari Pelaksanaan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar.....	87
a. Kendala dari UPK .....	87
b. Kendala dari Peminjam .....	90
c. Kendala dari Pemerintah Desa .....	93
D. Pembahasan .....	94
1. Pelaksanaan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar .....	94
a. Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan, Musyawarah Desa (Perencanaan) dan Sosialisai .....	94
b. Pelaksanaan Kegiatan Tridaya dan Pencairan Dana .....	96
c. Hasil .....	99
d. Pertanggungjawaban dan Pelestarian .....	101
2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dari Pelaksanaan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kec.Bakung, Kab.Blitar.....	105
a. Kendala dari UPK .....	105
b. Kendala dari Peminjam .....	106
c. Kendala dari Pemerintah Desa .....	107
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>

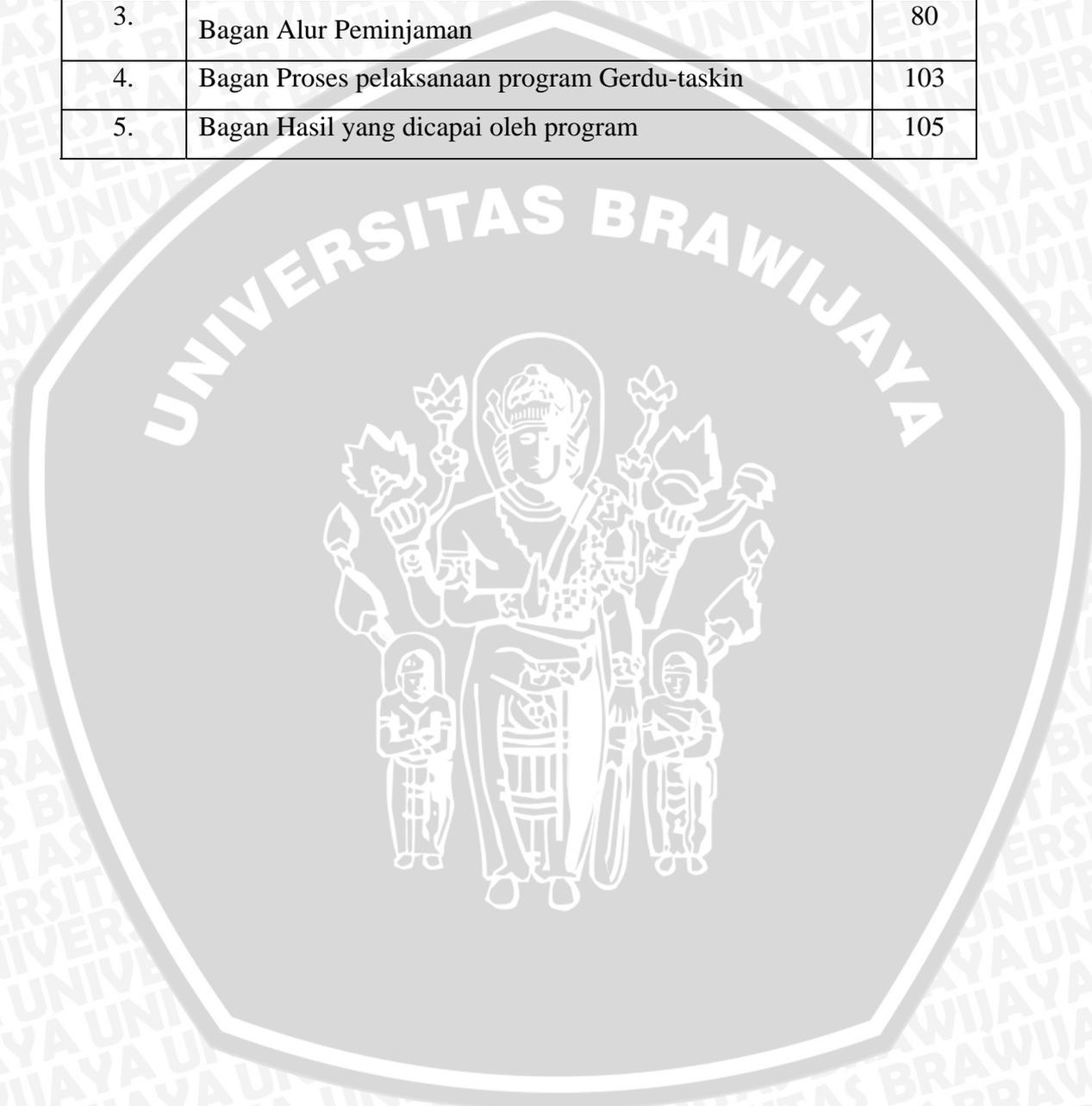
## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Daftar Angsuran Dan Tunggalan Pinjaman	5
2.	Tingkat Pendidikan Penduduk	47
3.	Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin	48
4.	Jenis Mata Pencaharian Penduduk	48
5.	Laporan keuangan Program Pemberdayaan Manusia Gerdu- Taskin Desa Plandirejo Tahun 2004	74
6.	Laporan Program Pemberdayaan Lingkungan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo Tahun 2004	76
7.	Laporan Kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Gerdu- Taskin Desa Plandirejo Tahun 2004	81
8.	Perbandingan Pendapatan RTM	85
9.	Daftar Angsuran Dan Tunggalan Pinjaman	91



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Bagan Analisis Data Model Interaktif	44
2.	Bagan Struktur Organisasi Pengelola Program Gerdu-Taskin	64
3.	Bagan Alur Peminjaman	80
4.	Bagan Proses pelaksanaan program Gerdu-taskin	103
5.	Bagan Hasil yang dicapai oleh program	105



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Lampiran Berita Acara Musdes Plandirejo	ix
2.	Lampiran Anggaran Biaya Pemberdayaan Manusia	xiv
3.	Lampiran Anggaran Biaya Pemberdayaan Lingkungan	xv
4.	Lampiran Anggaran Pemberdayaan Usaha	xvi
5.	Lampiran Daftar Angsuran dan Tunggakan Pinjaman	xxi
6.	Peserta musyawarah	xxii
7.	Daftar penerima manfaat	xxiii
8.	Pedoman Wawancara	xxiv
9.	Daftar Desa/Kelurahan dengan kategori merah, kuning, hijau, biru, dan putih, berdasarkan pendataan kemiskinan indikator baru tahun 2001	xxvi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan. (Nurkse, 1953:1)

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin. (Bappenas, 2004:2)

Bappenas (2004:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain,

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan dan menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004–2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Berbagai kebijakan dalam RPJM 2004 – 2009 diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 15,90 persen pada tahun 2008. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan (SNPK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 persen pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk Komite Pengentasan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengentasan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan (Sahdan, 2005:1).

Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka dimulailah era baru Pemerintah Daerah dengan otonomi luas, di mana kepada Pemerintah Daerah dipercayakan peran yang sangat besar dengan dukungan sumber pendapatan daerah. Tuntutan dari berbagai Daerah agar otonomi luas harus diwujudkan sangat besar sehingga perlu ada langkah konkrit untuk merealisasikan otonomi luas tersebut. Upaya mengatasi kemiskinan menuntut jajaran Pemerintah Daerah dapat menempatkan diri secara tepat dalam era otonomi luas ini dengan mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mempercepat penanganan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu dari 6 isu pokok prioritas pembangunan. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan.

Selama ini, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi pengentasan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Sahdan, 2005:1).

Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam bagian dari agenda RPJMD yaitu penanggulangan kemiskinan dalam tiga tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap (RPJMD: Agenda-Agenda Pembangunan Jawa Timur, 2006).

Salah satu program pengentasan kemiskinan Propinsi Jawa Timur adalah Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) yang dilaksanakan sejak tahun 2002 selama lima tahun ke depan. Memasuki fase II (2005-2007), program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Ketentuan dasar pelaksanaan Gerdu-Taskin antara lain mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di sempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2004 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan dana Gerdu-Taskin. Bantuan ini digunakan untuk mengentaskan kemiskinan pada beberapa rumah tangga miskin, khususnya pada beberapa Desa yang berada pada garis merah. Beberapa Desa di Kabupaten Blitar yang mendapat bantuan ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi setelah mendapat masukan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi dengan menggunakan acuan hasil PKIB BPS Jawa Timur (Humas Bapemas Kab. Blitar, 2007).

Desa Plandirejo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang mendapatkan bantuan dana Gerdu-Taskin. Desa tersebut mendapatkan bantuan dana Gerdu-Taskin dikarenakan banyak rumah tangga miskin di Desa Plandirejo yang berpotensi namun tidak memiliki modal usaha, selain itu Desa tersebut juga memperoleh rekomendasi dari BPS Propinsi Jawa Timur. Namun, di sisi lain Desa tersebut termasuk dalam kriteria yang gagal dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin, ini terbukti dalam penelitian awal bahwa kredit diberikan kepada siapa saja sehingga kurang tepat sasaran, seperti kurang optimalnya kinerja UPK yang disebabkan rangkap tugas serta sarana prasarana untuk menjalankan tugas seadanya; peminjam merupakan warga yang tergolong mampu dan tidak layak mendapat pinjaman, hal tersebut dapat terjadi karena yang benar-benar termasuk RTM tidak berani meminjam dikarenakan takut tidak dapat mengembalikan pinjaman, dalam hal ini RTM tersebut takut tidak dapat mengembalikan pinjaman karena tidak memiliki usaha yang produktif; tidak adanya dukungan dari pemerintah desa, yang terbukti kepala desa juga ikut meminjam bahkan tidak pernah membayar cicilan angsuran dengan tunggakan sebesar Rp.9.600.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2005, seharusnya pemerintah desa tersebut yang memberi sarana prasarana bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam pelaksanaan kegiatan Tridaya; serta banyaknya penunggakan dalam pengembalian cicilan pinjaman, hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1

**Daftar Angsuran Dan Tunggalan Pinjaman**

Posisi Bulan Mei 2007

No	Nama Pokmas	Tgl Realisasi	Tgl Jatuh Tempo	Plafon Pinjaman	Jml Tunggalan	
					Pokok	Bunga
1	1	2	3	4	5	6
1	Sidorejo II-1	10-08-2004	10-06-2005	8.000.000	8.000.000	1.600.000
2	Sidorejo II-2	01-02-2005	01-12-2005	5.000.000	5.000.000	1.000.000
3	Ngadirejo IV	10-08-2004	10-06-2005	5.000.000	5.000.000	400.000
4	Wonorejo II	29-07-2004	29-05-2005	5.000.000	5.000.000	900.000
5	Sidorejo III-3	27-07-2005	27-05-2006	6.000.000	1.800.000	360.000
6	Ngadirejo V-3	03-09-2006	03-07-2007	1.000.000	1.000.000	40.000
7	Ngadirejo IV-5	23-02-2006	23-12-2006	2.000.000	2.000.000	120.000
8	Ngadirejo IV-6	15-06-2006	15-04-2007	1.500.000	1.500.000	180.000
9	Ngadirejo IV-7	25-11-2006	25-09-2007	1.300.000	1.300.000	234.000
10	Ngadirejo IV-8	30-01-2007	27-11-2007	5.000.000	5.000.000	1.000.000
11	Wonorejo III-1	15-08-2004	30-06-2007	9.000.000	1.800.000	-
12	Wonorejo III-4	15-04-2005	15-02-2006	5.600.000	2.100.000	30.000
13	Wonorejo III-7	24-07-2005	15-05-2006	4.000.000	4.000.000	800.000
14	Wonorejo III-10	25-01-2006	24-11-2006	2.500.000	300.000	60.000
15	Wonorejo III-11	29-02-2006	25-12-2006	2.000.000	400.000	80.000
16	Wonorejo III-12	29-03-2006	20-01-2007	1.000.000	900.000	120.000
17	Wonorejo III-13	28-04-2006	29-02-2007	2.000.000	1.000.000	200.000
18	Wonorejo III-14	30-05-2006	28-03-2007	2.000.000	1.100.000	200.000
19	Wonorejo III-15	30-06-2006	30-04-2007	1.500.000	900.000	160.000
20	Wonorejo IV-1	30-09-2004	30-07-2005	6.800.000	254.000	-
21	Wonorejo IV-2	01-09-2004	30-07-2005	5.500.000	3.088.000	-
22	Wonorejo IV-3	01-10-2004	01-08-2005	2.100.000	1.069.000	245.000
23	Wonorejo IV-4	30-12-2004	01-10-2005	2.230.000	789.000	100.000
24	Wonorejo IV-5	30-12-2004	30-10-2005	1.400.000	1.015.000	198.000
25	Wonorejo IV-6	28-01-2005	30-11-2005	1.450.000	880.000	170.000
26	Wonorejo IV-7	30-02-2005	28-12-2005	1.050.000	520.000	97.000
27	Wonorejo IV-8	30-06-2006	30-04-2006	2.060.000	2.010.000	390.000
28	Wonorejo IV-9	26-07-2005	30-05-2006	3.690.000	3.690.000	738.000

Sumber : UPK Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 28 kelompok masyarakat (Pokmas) selaku peminjam tidak melakukan angsuran cicilan pinjaman, bahkan ada Pokmas yang sama sekali belum melakukan cicilan, hal tersebut dapat terjadi karena dana yang dipinjam tersebut digunakan untuk kegiatan non produktif. Hal tersebut membuktikan bahwa program Gerdu-Taskin di Desa Plandirejo termasuk dalam kriteria yang tidak sehat dikarenakan banyak terjadi penunggakan dalam pengembalian cicilan pinjaman.

Dalam pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis dan dalam suatu proses pelaksanaan yang matang dan terkoordinir, tepat sasaran tanpa adanya rasa egoisme sektoral. Apalagi dalam paradigma baru

di mana Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan makin berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun sosialisasi program yang diharapkan akan menimbulkan sinergi yang kuat di antara semua pelaku pengentasan kemiskinan.

Mengingat penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya keterpaduan baik keterpaduan sasaran, keterpaduan program intervensi maupun keterpaduan pelaku penanggulangan kemiskinan yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam hubungan inilah Pemerintah Daerah harus dapat memadukannya baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya.

Upaya pengentasan kemiskinan dengan program Gerdu-Taskin, salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, melalui pendekatan TRI DAYA (Pemberdayaan Usaha, Pemberdayaan Manusia dan Pemberdayaan Lingkungan) dengan fokus utama penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Mengingat begitu pentingnya program pengentasan kemiskinan tersebut di atas sehingga menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU-TASKIN) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”**(Suatu Studi Pada Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kec. Bakung, Kabupaten Blitar?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kec. Bakung, Kabupaten Blitar?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kec. Bakung, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dari pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kec. Bakung, Kabupaten Blitar.

### D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis:
  - a. Sebagai aplikasi praktek identifikasi masalah yang sebenarnya dalam dunia nyata dengan dasar teori yang ada.
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam dunia nyata di lapangan.
  - c. Sebagai media untuk mengidentifikasi masalah sesuai dengan obyek penelitian untuk kemudian dapat dirumuskan pemecahan masalah dalam suatu keputusan strategik.
2. Kontribusi Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian dan sumber informasi dalam studi tentang pelaksanaan pengentasan kemiskinan.
  - b. Sebagai bahan kajian berikutnya bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

### E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang dijadikan objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan skripsi.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjabarkan teori-teori yang relevan sebagai landasan penelitian yang dilakukan. Teori yang didapat dari berbagai studi pustaka, literatur, dan sumber-sumber yang mendukung tujuan penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

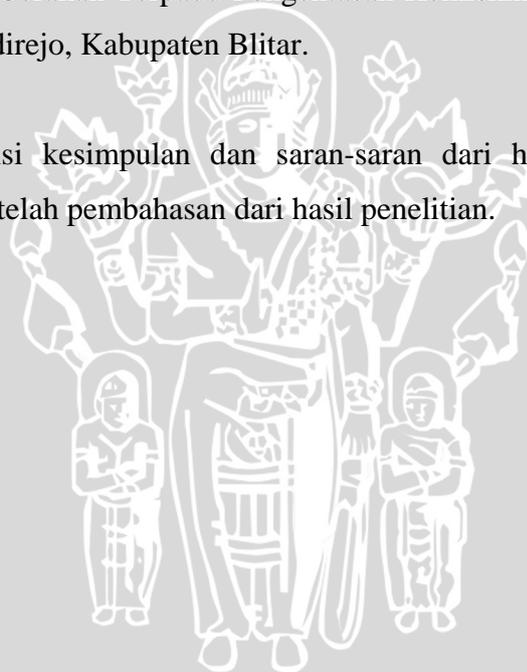
Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian, jenis penelitian dan alat-alat analisa yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV : Pembahasan**

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dan dampak dari Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kabupaten Blitar.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis yang dilakukan, setelah pembahasan dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agenda Otonomi Daerah merupakan sebuah agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks.

Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan Pembangunan Daerah adalah seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan-kegiatan sektor di daerah, maupun kegiatan-kegiatan masyarakat. Seluruh kegiatan pembangunan tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh daerah maupun untuk mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu seluruh kegiatan tersebut perlu dikoordinasikan dan diserasikan agar dapat mencapai sasaran pembangunan yang tepat di daerah.

Otonomi Daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita

ketahui, yaitu ketimpangan antar daerah, terutama antara Jawa dan Luar Jawa dan antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.

Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan jika sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislatif dan eksekutif di daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota, serta DPRD-DPRD Propinsi, kabupaten dan Kota) (Syaukani, 2003: 218).

Otonomi Daerah memiliki sejumlah kewenangan, terutama enambelas (16) kewenangan wajib sebagaimana ditentukan oleh UU No.32 Tahun 2004. Keenambelas kewenangan wajib itu merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Menurut Syaukani (2003:218) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, menyebutkan bahwa yang diharapkan dari Pemerintah Daerah itu adalah sejumlah hal, antara lain:

a. Fasilitas.

Di samping fungsi yang lainnya, fungsi Pemerintah Daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Segala bentuk perijinan hendaklah dipermudah, bukan sebaliknya, yaitu dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang akan menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Logika yang hendaknya digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah silahkan menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah untuk kegiatan ekonomi daerah.

b. Pemerintah Daerah Harus Kreatif.

Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas dari para penyelenggara pemerintahan. Karena itu, pejabat Pemerintah Daerah sekarang ini benar-benar dituntut untuk kreatif, kalau tidak demikian, masyarakat akan mempertanyakan kapasitasnya.

c. Politik Lokal yang Stabil

Masyarakat dan Pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Orang tidak akan mungkin mau menanamkan uangnya di suatu daerah dengan situasi politik lokal yang tidak stabil. Karena pemerintah tidak transparan dalam pembuatan kebijaksanaan publik maka hal itu mendorong terjadinya gerakan protes, dan tentu saja akan mengganggu jalannya pemerintahan.

d. Pemerintah Daerah Harus Menjamin Kesenambungan Berusaha

e. Pemerintah Daerah Harus Komunikatif Dengan LSM/NGO, Terutama Dalam Bidang Perburuhan Dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah sekarang dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi yang berkembang di kalangan perburuhan, baik yang menyangkut

upah minimum dan jaminan lainnya, hak-hak buruh pada umumnya, perlindungan kepada buruh wanita, ataupun menyangkut keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dengan demikian, Pemerintah Daerah hendaknya menjadi jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh. Pemerintah Daerah juga harus lebih sensitif dengan masalah atau isu lingkungan hidup serta gender. Dengan demikian, sikap-sikap radikal dari kalangan buruh yang didukung oleh LSM/NGO akan dapat diakomodasi, dan pada akhirnya dua kepentingan akan dapat terjembatani. Tentu saja, sikap-sikap yang seperti diperlihatkan oleh para pejabat masa lampau, yang selalu memihak kepentingan pengusaha, harus ditinggalkan.

Kelima elemen yang diungkapkan di atas merupakan prakondisi bagi terselenggaranya Pembangunan Daerah. Dengan kebijaksanaan otonomi yang luas maka peluang bagi daerah menjadi sangat luas pula, dan semuanya sangat bergantung pada daerah itu sendiri.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian dan Konsep Pemberdayaan**

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pendekatan pemberdayaan ini yang nantinya digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis masalah lebih lanjut. Konsep pemberdayaan ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (*power*) dan kemampuan

(kapabilitas) yang melingkup sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Muchtari, 2003:3).

Selain itu, Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kandungan kapital baik yang tersedia dalam masyarakat maupun yang bersumber dari kapital eksternal. Mengacu pada UU No. 32/2004 pemberdayaan berarti pengikutsertaan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemilikan. Dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar peningkatan partisipasi juga dalam kepemilikan. (Saragi P, Tumpal: 2004:133).

## 2. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2004:1)

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampho). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah Desa/Kelurahan; seorang anggota DPRD

setempat; nama Presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis jenis. Dari indikator-indikator yang telah dipaparkan di atas maka Suharto, 2004 menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan di antaranya:

- a. Permasalahan rendahnya kapabilitas dan ketersediaan sumber daya alam bagi proses produksi primer. Rendahnya kualitas sumber daya lahan mengakibatkan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani produsen. Akibat selanjutnya ialah proses produksi kurang efisien dan harga jual produk yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk sejenis dari tempat lain.
- b. Permasalahan tata nilai (etos). Ketidakberdayaan yang telah berjalan dalam dimensi ruang dan waktu yang luas dan lama, dan telah mewarnai pengalaman kesejarahan berjuta penduduk, ternyata telah menyebabkan kemiskinan diterima sebagai bagian yang sah dari kehidupan serta mewarnai sistem nilai dan struktur sosial masyarakat. Ketidakberdayaan diterima sebagai keniscayaan yang tidak perlu dipermasalahakan lagi. Setiap usaha mengentaskan kemiskinan menjadi pekerjaan yang tidak mudah dan bahkan dipandang aneh dan mungkin dianggap "asosial". Dalam situasi budaya ini maka gejala kemiskinan tidak cukup kalau hanya dievaluasi sebagai fungsi dari keterbatasan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan saja, tetapi juga harus diperhatikan adanya fakta bahwa juga "miskin" terhadap makna kemiskinan itu sendiri.
- c. Keterbatasan penguasaan faktor produksi pertanian, khususnya lahan usaha. Sejumlah besar rumah tangga petani tidak memiliki lahan garapan atau hanya menguasai lahan sangat sempit (kurang dari 0.05 ha).
- d. Tenaga kerja pedesaan dengan ketrampilan teknis dan manajemen yang terbatas karena keterbatasan berlatih (bukan keterbatasan

pendidikan). Sebagian besar tenaga kerja (penduduk usia produktif) sedang menganggur dalam berbagai tingkat pengangguran.

- e. Keterbatasan lapangan kerja dan lapangan usaha di sektor pertanian, baik akibat keterbatasan lahan pertanian maupun sebagai akibat “keterlemparan” akibat masuknya input pertanian modern. Sementara itu, lapangan pekerjaan nonpertanian belum cukup ditunjang oleh tradisi bisnis desa.
- f. Keterbatasan alternatif pilihan teknologi budidaya untuk komoditi pertanian yang ekonomis, teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, serta teknologi nonpertanian. Kelompok masyarakat miskin di desa tidak mempunyai akses yang memadai untuk menentukan alternatif usaha tanaman dan agroteknologinya sehingga produktivitas marginalnya sangat rendah. Perkembangan lapangan kerja nonpertanian juga belum didukung oleh teknologi tepat guna yang memadai, atau masih bersifat kecil-kecilan dan sederhana sekali.
- g. Keterbatasan informasi, pembinaan, fasilitas permodalan, proteksi usaha, dan kesempatan merupakan suatu lingkaran yang lazim dalam bisnis modern. Hampir dalam setiap kegiatannya harus melakukannya secara swakarsa dan bersedia untuk harus puas dengan apa yang menjadi miliknya saja, tanpa keinginan untuk lebih dari apa yang mungkin. Sementara itu, faktor produksi unggulan tersebut dikuasai sektor perkotaan industrial, terutama dalam wujud informasi, teknologi dan fasilitas perkreditan.
- h. Nilai tukar perdagangan (*term of trade*) barang produk pedesaan lebih rendah terhadap barang produk perkotaan atau sektor modern. Hal ini mengakibatkan warga desa kurang memperoleh surplus yang berarti hampir dalam semua lapangan pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak memungkinkan melakukan akumulasi kapital. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai tukar pada petani.
- i. Terbatasnya volume uang yang beredar di pedesaan. Hal ini merupakan dampak dari produktivitas marginal yang sangat rendah atau nol dan keterbatasan fasilitas kredit resmi yang masuk ke desa. Sebagian besar penduduk di pedesaan miskin jika memerlukan kredit untuk tambalan modal akan mencari pada saluran kredit atau lembaga keuangan nonformal.
- j. Kebijakan pemerintah yang lebih menitikberatkan pada laju pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Demikian juga kebijakan pertanian yang dititikberatkan pada swasembada pangan nasional dan kurang mengacu pada pemenuhan konsumsi pedesaan telah menyebabkan sektor pedesaan/pertanian hanya berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional, dengan keterbatasan akses untuk menentukan pilihan ekonomis.
- k. Belum berfungsinya kelembagaan swadaya masyarakat di pedesaan yang mampu menampung prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat untuk mengentaskan diri sendiri. Kelembagaan yang ada masih kurang fungsional dan/atau tingkat swadaya rendah.

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin yang pada kenyataannya sangat berhubungan erat dengan (1) masalah pendapatan yang diperoleh; (2) masalah gizi dan pangan; (3) masalah kesehatan; (4) masalah kematian; (5) masalah lingkungan pemukiman; (6) masalah pendidikan; (7) masalah penguasaan iptek; (8) masalah pemilikan lahan; (9) masalah kesempatan kerja; dan (10) masalah prasarana/sarana kebutuhan dasar.

### 3. Tujuan dan Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport dalam Muchtar, 2003:4).

Sedangkan menurut *Cornell Empowerment Group* dalam Mulyadi (2005:1), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok, yang mana melalui proses ini mereka yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut.

Asumsi teori pemberdayaan: (1) Pemberdayaan memiliki bentuk yang berbeda untuk (sekelompok) orang yang berbeda, (2) Pemberdayaan memiliki bentuk yang berbeda dalam situasi berbeda, (3) Pemberdayaan berfluktuasi atau berubah sesuai dengan perubahan waktu.

Syarat berlangsungnya proses pemberdayaan: (1) Anggota masyarakat memiliki "rasa kemasyarakatan (*sense of community*/guyub/kebersamaan) dan mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, (2) Partisipasi warga, yaitu suatu proses di mana tiap individu ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga, program dan lingkungan di mana mereka berada.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka dalam Muchtar (2003: 1), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan

kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat dalam Muchtar (2003 :1), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto dalam Muchtar (2003 :1) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al. dalam Muchtar, 2003 :6).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi .

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

#### 4. Pembangunan dalam Konsep Pemberdayaan

Dalam konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) (Putra,2002: 81). Pembangunan masyarakat (*community development*) adalah suatu proses yang menyangkut usaha, di antaranya: (1) usaha masyarakat dan pihak lain untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budayanya, (2) usaha untuk meningkatkan integritas masyarakat ke dalam suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, (3) mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami masalah dan mengatasi masalah di kehidupannya, dan (4) mengembangkan fasilitas teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya.

Sedangkan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) bercirikan: (1) pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, (2) *community management* yang merekomendasikan satuan pengelola lokal yang pluralistik sebagai *decision maker* yang memobilisasi sumberdaya lokal, (3) *social learning*, yakni proses pembelajaran antara lembaga-lembaga masyarakat dengan anggota-anggota masyarakat, dan (4) *management strategic* yang berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya.. Ada tiga (3) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu: (1) *the welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat; (2) *the development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat; (3) *the empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari

proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Cook dan Macaulay (1977) memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali kaku dan memberi orang tersebut dengan kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide dan keputusan-keputusan. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika moral, di antaranya: (1) mendorong adanya ketabahan, (2) mendelegasikan wewenang sosial, (3) mengatur kinerja, (4) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern), (5) menawarkan kerjasama, (6) berkomunikasi secara efisien, (7) mendorong adanya inovasi, dan (8) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. (Putra 2002:82).

Sehingga pembangunan harus dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang pilih sendiri. Oleh karena itu, Bryant dan White memandang pembangunan yang berwawasan *people centered* sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat berperan serta. Terkait dengan itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa pembangunan bukanlah semata-mata untuk meningkatkan manfaat material yang pada tatanan praktis seringkali membuahkan *dehumanizines* sehingga paradigma *people centered development* ini dalam membangun martabat manusia membutuhkan

aspek-aspek, antara lain: (1) *capacity*, yaitu membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok untuk melakukan pembangunan, (2) *equity*, yaitu mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, (3) *empowerment*, yaitu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya, (4) *sustainability*, yaitu membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri dan hidup terus, dan (5) *interdependence*, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan saling menguntungkan serta menghormati. (Putra 2002:83).

### C. Kemiskinan

#### 1. Konsep dan Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Suharto, 2004:1). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Suharto, 2004:1).

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto, 2004:1).

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Suharto, 2004:1)

Bappenas dalam Sahdan (2005:4) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Hal ini setidaknya terlihat pada batasan yang dikemukakan UNDP (1997) dalam Muchtar (2003:4), bahwa seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya (hanya) berada dibawah garis kemiskinan. Oleh Karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara dunia ketiga baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah, kebanyakan (hanya) bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal.

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan

kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Sahdan, 2005:1).

Untuk itu, menurut Zikrullah dalam Muchtar (2003:4), sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu di fahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu: (a) kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal; (b) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan; (d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas; (e) kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antara kelompok social, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas.

Selanjutnya, Narhetali mengutip hasil penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan Yeates & Mc Laughlin dari Bank Dunia (2000) yang menyatakan, bahwa orang miskin mempunyai penekanan yang berbeda dari pembuat kebijakan tentang hal-hal yang dipersepsi sebagai dimensi kemiskinan. Selain tingkat pendapatan, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, kaum miskin juga menekankan faktor psikologis seperti kepercayaan diri, ketidakberdayaan (*powerlessness*) serta pengucilan fisik dan sosial sebagai sumber kemiskinan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa bagi orang, kelompok, komunitas, masyarakat miskin, ternyata peningkatan pendapatan bukanlah satu-satunya hal yang amat

penting. Tetapi, perlakuan humanis penuh harga diri, *self-respect* juga merupakan sesuatu yang amat bernilai (Kompas, 5 Maret 2003)

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah: (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Berdasarkan kerangka pikir itu, penanganan kemiskinan melalui Gerdu-Taskin, mulai memandang, bahwa peningkatan pendapatan bukan satu-satunya hal yang amat penting, tetapi perlakuan humanis penuh harga

diri, mengakui potensi mereka dengan pengedepanan pendekatan pemberdayaan dan institusi lokal melalui UPK merupakan unsur lain yang ditekankan.

## 2. Penyebab kemiskinan

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

Menurut Bank Dunia dalam Sahdan (2005:1), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

- a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- c. Penyebab sub-budaya ("*subcultural*"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di [Amerika Serikat](#) (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai [pekerja miskin](#); yaitu orang yang tidak [sejahtera](#) atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas [garis kemiskinan](#).

### 3. Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi

Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka dimulailah era baru Pemerintah Daerah dengan otonomi luas, di mana kepada Pemerintah Daerah dipercayakan peran yang sangat besar dengan dukungan sumber pendapatan daerah. Tuntutan dari berbagai Daerah agar otonomi luas harus diwujudkan sangat besar sehingga perlu ada langkah konkrit untuk merealisasikan otonomi luas tersebut. Upaya mengatasi kemiskinan menuntut jajaran Pemerintah Daerah dapat menempatkan diri secara tepat dalam era otonomi luas ini dengan mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mempercepat penanganan pengentasan kemiskinan.

Paradigma penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah saat ini adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila “kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan” (Mubyarto, 2002:1). Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. “Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa,

melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya” (Mubyarto,2002:1).

Dengan pola pikir yang demikian kita percaya bahwa para pemimpin Pemerintah di tingkat daerah akan mempunyai kepedulian yang sangat besar bagi upaya pengentasan kemiskinan dan memiliki rasa kebanggaan jika rakyat di daerah terbebas dari kemiskinan dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian kita yakin bahwa para pemimpin pemerintahan tersebut akan mengerahkan segala dana dan daya yang ada di Daerah untuk mengatasi keadaan kemiskinan di daerahnya (Kaloh, 2002:128)

Visi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan yaitu ”membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, sehat dan mandiri, serta bebas dari kemiskinan dan mampu mengatasi bencana karena sadar dan siap mengatasi bencana”. Untuk mengembangkan visi tersebut ada beberapa prinsip yang harus diterapkan yaitu:*Pertama*, berorientasi pada manusia dalam arti manusia yang menjadi pusat perhatian dan pusat pembangunan. *Kedua*, mengupayakan terjadinya keseimbangan pembangunan antar wilayah sehingga pembangunan dilakukan secara merata. *Ketiga*, memberikan titik berat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan kepada pemberdayaan kaum perempuan. *Keempat*, mendukung era otonomi luas dengan kewenangan dan tanggungjawab yang luas kepada Pemerintah daerah sedangkan Pemerintah Pusat akan lebih ”Tutwuri Handayani”. *Kelima*, pemberdayaan masyarakat dan LSM agar berperan lebih besar dalam proses pembangunan. *Keenam*, adalah prinsip dorong tarik dalam arti mendorong masyarakat miskin melalui bantuan kredit Taskin dan skim-skim kredit dengan bunga rendah dan mudah memperolehnya, selanjutnya ”ditarik” oleh kebijakan sektor ekonomi makro yang berpihak kepada orang miskin.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dikembangkan prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia, terutama pada pemberdayaan anak-anak dan wanita, untuk mempersiapkan SDM yang andal yang memperdayakan wanita sebagai pilar bangsa.
- b. Menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan dan mempermudah akses keluarga miskin terhadap kesempatan berusaha, modal, dan pemasaran produk-produk yang dihasilkannya.
- c. Penanganan bencana dan musibah, akibat kerusuhan, baik karena alam maupun karena ulah manusia.

#### 4. Strategi Pemberdayaan Penduduk Miskin

Ada beberapa hal tentang konsep penanggulangan kemiskinan yang dianggap sesuai dengan konteks sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisik. Konsep ini dikatakan sebagai konsep teoritis karena baru merupakan hasil refleksi semua pihak terhadap pengalaman empirik masing-masing dan belum teruji secara empirik.

Menurut Adiyoga dan Erni Herawati, 2003:12, secara garis besar strategi tersebut adalah:

1. Memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan serta dalam mengakses pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan keberdayaan ini dilakukan dengan memperkokoh usaha pertanian ladang, peternakan dan konservasi alam yang merupakan penyangga ketahanan pangan .
2. Memfokuskan pada upaya penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi keluarga miskin untuk beralih dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Upaya ini dilakukan dengan mempermudah akses keluarga miskin ke sumber modal usaha, teknologi dan informasi yang diperlukan. Penumbuhkembangan sektor-sektor non pertanian yang 'dekat' dengan keluarga miskin (kerajinan rakyat, perdagangan kecil-sektor informal, dan lain-lain) diharapkan dapat menjadi penyangga pangan keempat setelah usaha tani/ladang, usaha peternakan dan stok pangan non budidaya di hutan.
3. Upaya peningkatan keberdayaan keluarga miskin ini dikaitkan dengan upaya pemberdayaan komunitasnya (masyarakat Desa/Kelurahan) agar mampu membantu warganya mengatasi masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya. Untuk tujuan ini, falsafah yang diacu oleh setiap program pembangunan di propinsi adalah "membangun dari apa yang ada dan dimiliki oleh rakyat", suatu filosofi yang secara implisit mengakui pentingnya memperhatikan konteks lokal.

4. Melakukan reposisi peran pihak-pihak 'luar desa' (pemerintah, LSM, kalangan dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain), dari semula sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan keluarga miskin yang berbasis komunitas dilakukan dengan cara pemberian kewenangan luas kepada masyarakat Desa/Kelurahan dalam mengelola upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayahnya. Adiyoga dan Erni Herawati menyebutkan kewenangan tersebut meliputi :

- a. Kewenangan untuk menentukan sendiri aktivitas penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahannya. Ini berarti peran perancangan kegiatan harus dipegang sepenuhnya oleh masyarakat Desa/Kelurahan (semacam master plan di desa). Pihak luar desa (pemerintah, LSM, kalangan usaha, dan lain-lain) dapat memberi kontribusinya dengan mengacu pada desain besar (*grand design*) yang dibuat oleh masyarakat Desa/Kelurahan itu sendiri (melalui kontrak sosial antara masyarakat Desa/Kelurahan dengan pihak luar Desa/Kelurahan). Dengan pendekatan semacam ini maka :
  1. Semua aktivitas penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan sesuai dengan konteks setempat – kontekstual (sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisiknya).
  2. Semua aktivitas penanggulangan kemiskinan sepenuhnya mengacu pada pemanfaatan secara optimal sumber daya setempat dan pemanfaatan secara bijak sumberdaya dari luar.
  3. Tidak ada lagi pihak luar desa yang membawa masing-masing bendera program penanggulangan kemiskinannya (ego sektoral), yang seringkali tumpang tindih satu dengan lainnya dan acapkali tidak sesuai dengan konteks setempat (kebijakan satu pintu untuk setiap bantuan dari pihak luar Desa/Kelurahan)
- b. Masyarakat Desa/Kelurahan diberi peluang luas untuk melaksanakan sendiri aktivitas penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayahnya. Pihak luar desa, dapat memberi kontribusi dalam tahap ini, terutama kontribusi terhadap hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa/Kelurahan (seperti: keahlian teknis tertentu, informasi-informasi terhadap peluang-peluang pasar yang ada di luar desa, teknologi yang tersedia, dan lain-lainnya).
- c. Masyarakat Desa/Kelurahan diberi pula peluang untuk menumbuhkan sendiri prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap setiap aktivitas penanggulangan kemiskinan yang lakukan (menumbuhkan kontrol publik). Ini berarti bahwa orientasi pertanggungjawaban fokusnya harus dtujukan kepada keluarga miskin dan masyarakat Desa/Kelurahan (komunitasnya) dan tidak lagi semata-mata ditujukan ke pihak-pihak di desa.

Dengan ketiga kewenangan tersebut, maka masyarakat desa memiliki peluang belajar langsung sehingga proses pembelajaran yang dinamis dan partisipatif (aksi dan refleksi sebagai satu kesatuan proses yang dinamis yang melibatkan secara aktif para pemanfaatnya sebagai pelaku utamanya).

Upaya pemberdayaan penduduk miskin yang berbasis komunitas menuntut adanya perubahan cara berpikir dan bertindak (reposisi peran) pihak luar desa. Disini harus dipahami bersama bahwa keluarga miskin tidaklah tinggal dalam ruang hampa. berinteraksi dengan lingkungannya (warga desa lainnya -komunitas desanya dan lingkungan fisiknya) dan berinteraksi pula dengan lingkungan luar desa. Oleh sebab itu, perubahan lingkungan luar desa dapat mempengaruhi pula kehidupan keluarga miskin. Dengan kata lain, perubahan paradigma yang menekankan pada peran luas masyarakat Desa/Kelurahan harus pula diikuti dengan perubahan paradigma berpikir dan bertindak semua pihak di desa yang terkait (Adiyoga dan Erni Herawati, 2003:12)

#### **D. Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin)**

##### **1. Latar Belakang**

Hasil pendataan kemiskinan dengan indicator baru (PKIB) yang dilakukan BPS pada Tahun 2001 memberikan data kondisi kemiskinan di Jawa Timur, di mana masih terdapat 1.801 Desa/Kelurahan berkategori merah (miskin) dan 1.648 Desa/Kelurahan berkategori kuning (mendekati miskin). Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 2.196.363 RTM atau 7.267.843 Jiwa penduduk miskin.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu dari 6 isu pokok prioritas pembangunan. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas

kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur dilaksanakan sejak Tahun 2002. Selama lima tahun kedepan sejak awal pelaksanaannya, sasaran strategis program Gerdu-Taskin dengan dukungan dari APBD Propinsi Jawa Timur meliputi seluruh Desa/Kelurahan miskin kategori merah berdasarkan hasil PKIB BPS Jawa Timur 2001 sejumlah 1.801 Desa/Kelurahan.

Pada pelaksanaan program fase I (tahun 2002, 2003, dan 2004), prioritas program diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRI DAYA meliputi: (i) pemberdayaan manusia, (ii) pemberdayaan usaha, dan (iii) pemberdayaan lingkungan.

Memasuki fase ke II (2005-2007), program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan diwujudkan dengan memantapkan pola kemitraan antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan *Stakeholder* lainnya. Keberlanjutan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai program awal yang dilanjutkan dengan program penguatan dan program pemandirian, yang dilakukan secara selektif pada desa/Kelurahan lokasi.

## 2. Tujuan

### 1) Tujuan Umum

Program Gerdu-Taskin bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif RTM melalui pendekatan Tridaya

2) Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan peran serta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab.
- b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM berpotensi.
- c. Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha UPK dan RTM dalam rangka mengatasi pengangguran.
- d. Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan peningkatan kesejahteraan RTM-R.
- e. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum Desa/ Kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola pembangunan Desa/Kelurahan pada umumnya.
- g. Mengoptimalkan kemitraan antar-*stakeholders* dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

**3. Ketentuan Dasar Pelaksanaan**

1) Dasar Pelaksanaan

- a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c. Peraturan Presiden 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008
- e. Peraturan Gubernur Nomor XX Tahun 2005 Tentang RKPD Propinsi Jawa Timur 2006
- f. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2004 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur yang disemprnakan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/27/KPTS/013/2006 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur.
- g. Nota Kesepakatan DPRD Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Nomor: 903/6628/050/2005 Dan Nomor: 188/1/KPB/013/2005 Tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Propinsi Jawa Timur 2006.

## 2) Prinsip

Landasan gerak operasional Progran Gerdu-Taskin berlandaskan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Partisipasi, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan mulai dari sosialisasi, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pertanggungjawaban sampai dengan pelestarian, seoptimal mungkin dilaksanakan dengan memeran sertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin itu sendiri.
- b. Keswadayaan, bahwa pengembangan program didasarkan atas pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dan seoptimal mungkin dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi dan kemampuan lokal.
- c. Transparan dan akuntabel, bahwa informasi yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar semua warga memiliki peluang luas dalam melaksanakan kritik

maupun pengawasan, sehingga pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Keterpaduan, bahwa program dikembangkan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pelaku pembangunan lainnya secara sinergis.
- e. Otonomi dan Desentralisasi, bahwa masyarakat Desa/Kelurahan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam pengelolaan kegiatan.
- f. Peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan, bahwa kaum perempuan mendapat prioritas sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
- g. Keberlanjutan, bahwa pengelolaan program mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kegiatan.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata implementasi program Gerdu-Taskin secara sistematis dan faktual di lapangan, serta kecenderungan pencapaian hasil program, oleh karena itu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 63).

Seperti kita ketahui bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Sevilla, 1993: 71).

Metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. (Sevilla, 1993: 71).

Menurut Newman (1997:19) dalam Muchtar (2003:5), penelitian deskriptif mampu menyajikan gambaran secara detail dari sebuah situasi dan atau *setting social*. Menurut Danim (2002:61) dalam Muchtar (2003:6), pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang.

Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan fenomena-fenomena dan fakta-fakta. Menurut Ndraha (1991:101) adalah “ prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan/tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang itu sendiri atau penelitian yang bercirikan suatu

periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dan objeknya didalam lingkungan subyek itu”.

Tujuan penelitian kualitatif menurut Ndraha (1991:105) “ penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya obyek pada suatu masa atau saat tertentu, dimana ini akan dapat :

1. Melukiskan keadaan obyek pada suatu saat.
2. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala – gejala dari pada suatu peristiwa.
3. Menentukan data yang menunjukkan *appereance* dari suatu realitas.
4. Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide atau peraturan.

Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan unsur yang penting di dalam sebuah penelitian. Dengan adanya fokus penelitian maka dapat lebih efektif menetapkan kriteria untuk mendapatkan informasi. Selain itu penelitian yang dilakukan juga akan lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi, sehingga obyek yang diteliti teratur dan jelas.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, adapun mekanisme kegiatannya meliputi:
  - a. Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan, Musyawarah Desa Perencanaan dan Sosialisasi.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Tridaya & Pencairan dana
  - c. Hasil
  - d. Pertanggungjawaban dan Pelestarian

2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dari Pelaksanaan Gerakan Terpadu pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.
  - d. Kendala dari UPK
  - e. Kendala dari Pokmas
  - f. Kendala Dari Pemerintah Desa

### **C. Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Sedangkan alasan pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu Desa di Kabupaten Blitar yang mendapatkan dana Gerdu-Taskin
2. Desa Plandirejo memiliki angka kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Bakung yang lain. Berdasarkan penilaian Pendataan Kemiskinan Indikator Baru (PKIB) BPS Tahun 2001, Desa Plandirejo merupakan Desa yang berkategori merah, yaitu persentase jumlah RTM mencapai 37,12% dengan jumlah 317 RTM.

Adapun situs penelitiannya adalah Sekretariat Unit Pengelola Keuangan Desa Plandirejo. Alasan peneliti memilih Sekretariat Unit Pengelola Keuangan Desa Plandirejo adalah karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian sumber data digunakan untuk mengetahui dari data berasal. Menurut S. Arikunto (1998:114) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenisnya data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi:

1. Data Primer

Menurut Nasir (1998:58) data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti dari kejadian yang lalu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung di

lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah:

- a. Ketua UPK
  - b. Bendahara UPK
  - c. Pokmas Plandirejo yang menjadi penerima manfaat
2. Data Sekunder

Yaitu data pelengkap atau penunjang data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip di Unit Pengelola Keuangan yang ada hubungannya dengan program pelaksanaan Gerdu-Taskin.

Sedangkan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Informan

Menurut Moleong (2000:90), informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian antara lain:

- a. Informan awal : Informasi yang didapat dari para pengurus yang melakukan penyaluran pinjaman kepada Pokmas.
- b. Informan dengan sistem *snowball* : pengumpulan data yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih, karena tidak mengetahui kondisi dan struktur warga dan masyarakat dalam lokasi tersebut sehingga ia tidak bisa merencanakan pengumpulan data secara pasti. Untuk itu, peneliti bisa secara langsung memasuki lokasi dan bertanya mengenai informasi yang sangat terbatas, namun ia boleh bertanya kepada informan pertama tersebut barangkali ia mengetahui siapa yang mengetahui informasinya yang dapat ia temui. Dari petunjuk informasi pertama tersebut, peneliti bisa menemukan informasi kedua, selanjutnya ke informan ketiga untuk bisa mengetahui dan mengenalnya lebih jauh, begitu seterusnya sehingga peneliti mampu menggali data secara lengkap dan mendalam.

- c. Informan akhir : informasi yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian sehingga mencapai tingkat kejenuhan, yang ditujukan kepada Ketua dan Bendahara UPK.

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (*sampling* bertujuan), artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui secara baik pelaksanaan Gerdu-Taskin di Desa Plandirejo. Untuk itu, informan yang telah dipertimbangkan sesuai dan mengetahui secara baik pelaksanaan program adalah pengurus UPK Gerdu-Taskin Plandirejo, Ketua dan anggota Pokmas.

2. Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari Kantor sekretariat UPK.

3. Peristiwa

Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengurus UPK dalam melaksanakan Pelaksanaan kegiatan Tridaya Khususnya Pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Tujuan pengumpulan data sangat tergantung pada tujuan dan metodologi penelitian, khususnya analisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden. Wawancara mendalam yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian

Wawancara digunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan. Dan wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, serta dapat juga dilakukan menggunakan angket atau via telepon (Nawawi,2005: 110-111).

Dalam hal penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada subyek penelitian yaitu Ketua dan Pengurus Gerdu-Taskin pada bagian-bagian yang dapat memberikan informasi khususnya tentang sistem pelaksanaan program Gerdu-Taskin serta Pokmas yang menjadi kelompok sasaran.

## 2. Dokumentasi

Analisis dokumen merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Data-data yang diperoleh melalui cara ini merupakan data sekunder dan data yang pada umumnya sudah ada. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen mengenai Demografi Desa Plandirejo yang berisi tentang kondisi geografis dan kondisi penduduk di Lingkungan Desa Plandirejo, Pedoman umum Gerdu-Taskin 2007 yang masih mengacu pada pedoman umum Gerdu-Taski 2004, serta arsip-arsip yang ada di sekretariat UPK yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tridaya khususnya untuk pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam.

Dengan analisis dokumen ini penulis akan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan yang digunakan dalam pelaksanaan program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.

## 3. Observasi / Pengamatan

Observasi (pengamatan langsung), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya. Secara rinci Sanafiah Faisal mengemukakan:

“Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan

dengan mata kepala saja melainkan juga semua jenis pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung” (Faisal,1999: 35).

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan Tridaya yang dilakukan oleh Pengurus UPK Plandirejo. Kegiatan-kegiatan yang diamati tersebut meliputi bagaimana pelaksanaan kegiatan Tridaya dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tridaya yang dilakukan oleh Pengurus UPK Plandirejo.

## **F. Instrumen Penelitian**

Pengertian instrumen penelitian merupakan alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Dalam penelitian ini, instrument penelitian digunakan dengan tujuan agar kegiatan dapat terarah dan sistematis. Instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

### **1) Peneliti**

Instrumen ini adalah peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2000:4) mengemukakan bahwa instrumen atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri. Jika tidak memasukkan peneliti sebagai instrumen penelitian,

sangat tidak mungkin, sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di lapangan.

- 2) Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan.
- 3) Catatan Lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat hasil wawancara, hasil pengamatan dan pandangan penulis terhadap apa yang dilihat dan dengan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan.

### G. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut M.S Khadafi dan Lolita (2002: 98) analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya.

Dengan analisis data kualitatif tersebut, maka penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif (Milles dan Hubberman dalam Rohidi, 1992:16) yang meliputi:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan yang akan direduksi dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif, tabel, dan gambar, karena dimaksudkan untuk

memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

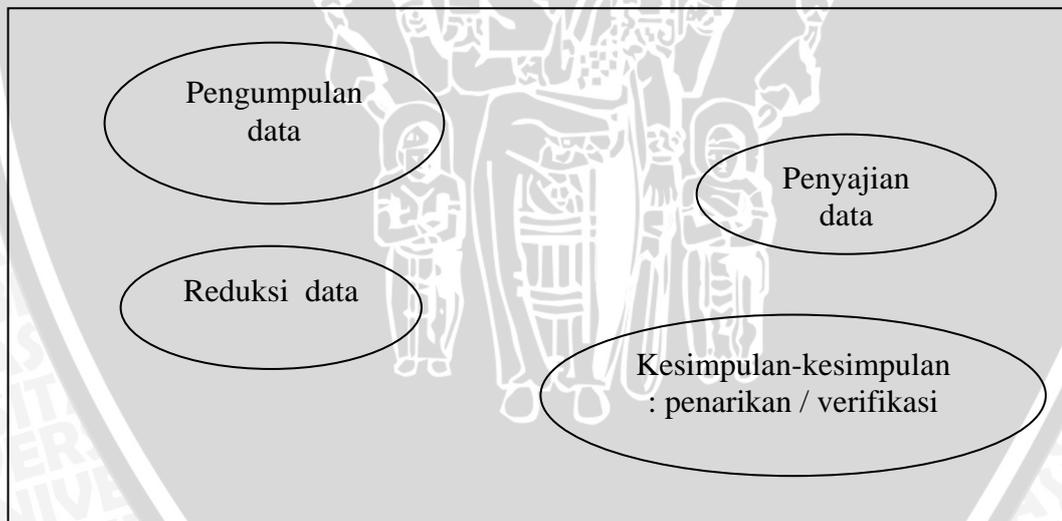
### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

**Gambar 2**

#### **Bagan Analisis Data Model Interaktif**



Sumber: Miles dan Huberman dalam Rohidi (1992: 20)

## H. Keabsahan Data

Agar penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan maka, diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Moleong, (2000:173-180) mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Memperpanjang Keikutsertaan Di Lapangan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, sedangkan penelitian ini memakan waktu kurang lebih dua bulan.

2. Melakukan Pengamatan Secara Intensif

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Melakukan *Peer Debriefing*

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari rekan-rekan sejawat yang diperoleh melalui diskusi.

4. *Triangulasi*

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Menurut Denzin (Moleong, 2000:178) ada empat *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini teknik *triangulasi* yang digunakan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

#### 1. Luas dan Batas Wilayah.

Desa Plandirejo merupakan Desa yang terletak di bagian selatan Kabupaten Blitar. Tepatnya terletak antara  $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}58'$  -  $8^{\circ}9'51''$  Lintang Selatan. Desa Plandirejo termasuk Desa yang berada di Kecamatan Bakung. Luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sekitar 714.515 ha. Desa Plandirejo memiliki curah hujan rata – rata 1.843 mm per tahun dan suhu  $20^{\circ}$  -  $26^{\circ}$  Celcius. Jarak Desa ke Kecamatan Bakung lebih kurang 5 km. Sedangkan ke Kabupaten Blitar adalah sekitar 32 km.

Berikut adalah batas-batas wilayah dari Desa Plandirejo:

- 1) Sebelah Selatan : Desa Tumpakoyot
- 2) Sebelah Timur : Desa Sumberdadi
- 3) Sebelah Utara : Desa Palerejo
- 4) Sebelah Barat : Desa Pucang Laban (Kabupaten Tulungagung).

#### 2. Wilayah Administratif

Desa Plandirejo merupakan salah satu desa dari wilayah di Kecamatan Bakung. Desa Plandirejo ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Suyitno yang diangkat pada 1 April 1999. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang perangkat desa, diantaranya adalah 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kamituwo / Kepala Dusun , 1 orang Kebayan / Ka Urusan Umum, dan 1 orang Modin. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dari Desa Plandirejo ini adalah 25, dan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 6.

Wilayah Desa Plandirejo terbagi dalam 3 Dusun yaitu: Dusun Wonorejo, Dusun Ngadirejo, dan Dusun Sidorejo. Untuk kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Desa Plandirejo dilengkapi

dengan prasarana pemerintahan diantaranya: Balai desa / Pedukuhan, Kantor Desa, Kantor BPD, dan Kantor PKK.

### 3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Sistem pendidikan masyarakat secara fungsional dilayani oleh berbagai kelembagaan pendidikan formal baik negeri maupun swasta umum, maupun yang berkaitan dengan keagamaan khususnya yang ada di Desa Plandirejo adalah kelembagaan pendidikan formal keislaman dan pendidikan non-formal. Peranan kelembagaan non-formal belum banyak berkembang walaupun mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh, untuk dapat lebih mendukung program-program pembangunan pedesaan. Tingkat pendidikan penduduk masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pendidikan orang tuanya, motivasi bersekolah dari anak-anak, serta adanya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang berada di Desa Plandirejo. Tingkat pendidikan formal Desa Plandirejo dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	<SD	298
2	SD	984
3	SLTP	1210
4	SLTA	573
5	Perguruan Tinggi	12

Sumber : Balai Desa Plandirejo, 2007.

### 4. Jumlah Penduduk

Desa Plandirejo memiliki jumlah penduduk sebesar 3674 jiwa yang terdiri dari 1844 orang perempuan dan 1830 orang laki-laki. Rataan dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari sejumlah rumah tangga dan setiap rumah tangga terdiri dari 4 jiwa. dari jumlah penduduk tersebut, 71,5% termasuk usia produktif (15-<64) dan 28,5% termasuk umur beban

tanggung ( <15 tahun dan >64 tahun), seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin.

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	<15 tahun	427	429	856
2	15 - <64 tahun	1309	1317	2626
3	>64 tahun	94	98	192
	Jumlah	1830	1844	3674

Sumber : Balai Desa Plandirejo, 2007.

### 5. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Plandirejo mempunyai mata pencaharian sebagai petani, sedangkan lainnya bekerja sebagai peternak, pedagang, buruh, pengrajin/tukang, dan ojek. hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 . Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian		Jumlah Penduduk
1	Petani Sawah	Pemilik	523
		Penggarap	41
		Buruh	209
	Petani Tegalan	Pemilik	359
		Penggara	19
		Buruh	96
2	Peternak	4	
3	Pedagang	53	
4	Buruh,	120	
5	Pengrajin/Tukang	47	
6	Ojek	26	

Sumber : Balai Desa Plandirejo, 2007.

Dari total penduduk usia produktif yang ada, ternyata belum seluruhnya bekerja. Hal ini khususnya sebagai akibat sebagian besar ibu rumah tangga yang tidak bekerja mencari penghasilan, termasuk umur produktif yang masih sekolah, umur dibawah 64 tahun yang sudah tidak mampu bekerja lagi, dan tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Banyak terdapat angkatan muda yang putus sekolah yang enggan bekerja di sektor pertanian, dan tidak mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian, sehingga masih menganggur.

## **B. Gambaran Umum Gerdu-Taskin Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Gerdu-Taskin ini meliputi:

#### **a) Program awal**

Program awal Gerdu-Taskin dialokasikan pada lokasi baru pada Desa miskin. Program awal ini dilaksanakan dengan pendekatan Tridaya, meliputi:

##### **1) Pemberdayaan Manusia**

Tujuan utama pemberdayaan manusia adalah pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan dan pengurangan beban biaya keluarga miskin rentan melalui bantuan dibidang pendidikan dan kesehatan. Namun oleh karena bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan sudah banyak dialokasikan melalui PKPS BBM, maka kegiatan pemberdayaan manusia lebih diarahkan untuk:

- a. Penyediaan seragam sekolah, alat tulis, dan buku penunjang bagi anak keluarga RTM-R.
- b. Bantuan sarana pendidikan bagi lembaga yang tidak memperoleh bantuan Operasional Sekolah.
- c. Perbaikan gizi keluarga RTM-R

## 2) Pemberdayaan Usaha

Tujuan utama pemberdayaan usaha adalah pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin serta perluasan kesempatan kerja terutama bagi RTM berpotensi.

## 3) Pemberdayaan Lingkungan

Tujuan utama pemberdayaan lingkungan adalah penyediaan prasarana rumah tinggal RTM-R dan lingkungannya, peningkatan fasilitas umum serta pengembangan kebutuhan prasarana/sarana ekonomi Desa dengan pola padat karya.

### **b) Program Penguatan**

Program penguatan Gerdu-Taskin dialokasikan pada sejumlah Desa yang telah mendapatkan program Gerdu-Taskin sebelumnya. Program penguatan antara lain meliputi:

- 1) Pelatihan UPK, pendampingan kepada UPK guna memantapkan kelembagaan, manajemen usaha dan ketrampilan.
- 2) Pembinaan Pokmas UEP guna memantapkan kewirausahaan, ketrampilan produktif, administrasi kelompok, pengembangan permodalan dan pengelolaan ekonomi ramah tangga.
- 3) Pembentukan forum UPK Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini UPK Gerdu-Taskin Desa Plandirejo belum mendapatkan program penguatan.

### **c) Program Pemandirian**

Programemandirian dialokasikan pada Desa miskin peserta program penguatan berprestasi berdasar hasil evaluasi perkembangan kelembagaan dan usaha UPK. Programemandirian antara lain meliputi:

- 1) Persiapan dan pembentukan BUMDes
- 2) Pengembangan akses permodalan, manajemen, teknologi, pemasaran.
- 3) Bantuan teknis (*Technical Assistance*)

**d) Manajemen Program**

Pengelolaan program Gerdu-Taskin dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip partisipasi, transparan dan akuntabel serta prinsip lainnya.

**e) Pengendalian Program**

Pengendalian program dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan, serta menjaga mutu pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berhasil secara optimal. Kegiatan pengendalian program meliputi: pelaporan, pengawasan publik, monitoring dan evaluasi serta bantuan teknis.

**f) Pendampingan**

Kegiatan pendampingan dilaksanakan guna memfasilitasi program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme kegiatan mulai taraf sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelestarian program.

Pendampingan dilakukan baik untuk program awal, program penguatan maupun program pemandirian. Kegiatan pendampingan ditujukan pada masyarakat sasaran, terutama bagi pengelola program Gerdu-Taskin mulai pada level Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pada level Desa. Kegiatan ini meliputi: penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional program, pendampingan proses mekanisme pelaksanaan kegiatan hingga tindak lanjut program.

**2. Penetapan Lokasi dan Sasaran**

Penetapan lokasi Gerdu-Taskin dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi setelah mendapat masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi dengan menggunakan acuan hasil PKIB BPS Jawa Timur tahun 2001. bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan *Up-dating* data, dapat

menggunakan hasilnya sebagai acuan dalam penetapan lokasi setelah memperoleh rekomendasi BPS Propinsi Jatim.

Lokasi Program Gerdu-Taskin diprioritaskan pada Desa kategori merah dan atau Desa dengan pertimbangan khusus seperti terkena bencana alam. Penetapan lokasi program Gerdu-Taskin yang didanai dari APBD Propinsi harus didukung oleh kesediaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana penyertaan (*sharing*) dan adanya komitmen melaksanakan program sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional Propinsi.

Seluruh Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan dana penyertaan (*sharing*), dapat melaksanakan program Gerdu-Taskin pola mandiri dengan mengalokasikan dana pendamping (*matching grant*) untuk Desa-Desa di luar lokasi sasaran APBD Propinsi.

Sasaran utama program Gerdu-Taskin adalah RTM berdasarkan data dan hasil PKIB BPS Jawa Timur, pada masing-masing Desa lokasi setelah diklarifikasi secara partisipatif.

### 3. Kaidah Pelaksanaan

#### a) Pelaksanaan Paket Satu

Pelaksanaan pemberdayaan usaha khusus dialokasikan untuk kelompok miskin berpotensi (RTMB) berbentuk pelayanan realisasi pinjaman modal usaha oleh UPK pada Pokmas UEP dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin meliputi:

- 1) Pelayanan permohonan pinjaman
- 2) Analisis kelayakan usaha dan peminjam
- 3) Penetapan pinjaman Pokmas UEP yang layak didanai
- 4) Penandatanganan perjanjian pinjaman

Pelaksanaan kegiatan sektor riil UPK berupa pengembangan investasi produktif dan prospektif maupun bentuk kerjasama UPK dengan pihak lain sesuai dengan yang telah disepakati. Akan tetapi UPK Plandirejo

dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha hanya untuk usaha simpan pinjam, bukan dalam usaha sektor riil.

Agar UPK mampu mengelola usaha dan melestarikan pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan secara optimal, dalam tahap pelaksanaan program TPM dan KTPM melaksanakan pembimbingan dan konsultasi berkaitan:

- 1) Pengelolaan keuangan usaha simpan pinjam
- 2) Manajemen usaha
- 3) Mempersiapkan rencana pelestarian kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan
- 4) Dana pemberdayaan usaha khusus dialokasikan untuk kelompok miskin berpotensi, digunakan untuk kegiatan simpan pinjam bagi Pokmas UEP
- 5) Dana pemberdayaan manusia khusus dialokasikan untuk kelompok miskin rentan, misalnya: untuk bantuan sarana pendidikan, perbaikan rumah tinggal RTMR, alokasinya sesuai dengan prioritas kebutuhan.
- 6) Bantuan kebutuhan dasar RTMR diberikan secara hibah, dalam bentuk dana tunai atau barang. UPK dapat menyusun sistem pemberian bantuan sedemikian rupa sesuai kesepakatan agar pola pemberian bantuan tepat sasaran, tepat perlakuan dan memandirikan RTMR.
- 7) Dana pemberdayaan manusia tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan yang arahnya mendukung pemberdayaan usaha kelompok miskinberpotensi (RTMB), pemberian beasiswa dan pemberian sembako.

#### **b) Pelaksanaan Paket Dua**

Pelaksanaan ini adalah realisasi kegiatan pemberdayaan lingkungan meliputi pembangunan fasilitas umum dan sarana prasarana fisik mendukung pengembangan ekonomi yang menjadi prioritas usulan masing-masing Desa, sumber dari pembiayaan APBD Kabupaten.

Untuk mengoptimalkan partisipasi dan pendayagunaan potensi swadaya masyarakat, maka prioritas jenis pemberdayaan lingkungan

sedapat mungkin dipilih yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat di masing-masing Desa.

Kegiatan pemberdayaan lingkungan harus dilaksanakan secara swakelola oleh Timlak, tidak boleh dilaksanakan dengan pola rekanan. Guna menghimpun potensi swadaya dan mendayagunakan sumber daya lokal yang ada, penyediaan bahan dan tenaga kerja seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Desa yang bersangkutan.

#### **4. Organisasi Pengelola Program**

Pengelolaan Program Gerdu-Taskin secara langsung dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Hal ini sekaligus untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi TKPK Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

##### **a) Organisasi Pengelola Propinsi**

##### **1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi**

TKPK-Propinsi adalah penanggungjawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

TKPK-Propinsi secara fungsional dikoordinasikan oleh Bappeprop. Dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin, TKPK-Propinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi.
- b. Menyiapkan data terkini tentang penduduk miskin di Jawa Timur.
- c. Membahas rencana kegiatan pengelolaan program Gerdu-Taskin beserta dukungan operasionalnya.
- d. Mengkoordinasikan peran dinas/instansi dan *stakeholders* lainnya dalam mendukung program Gerdu-Taskin.
- e. Membahas usulan dan menetapkan jumlah dana program Gerdu-Taskin.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program Gerdu-Taskin.

- g. Melaporkan pelaksanaan program Gerdu-Taskin kepada Gubernur secara berkala.

## 2) Sekretariat Tetap (Sektap) Propinsi

Sektap Propinsi adalah pelaksana kegiatan Program Gerdu-Taskin di Tingkat Propinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TKPK. Struktur organisasi Sektap paling tidak terdiri atas Ketua dibantu dengan bidang-bidang, yakni:

- a. Bidang program
- b. Bidang administrasi dan keuangan
- c. Bidang monitoring dan pelaporan.

Sektap propinsi diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Propinsi dengan tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Memberikan data dan informasi kepada TKPK untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program.
- b. Menyusun Pedoman Umum dan menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Gerdu-Taskin.
- c. Melakukan sosialisasi Program Gerdu-Taskin kepada Kabupaten/Kota.
- d. Menyelenggarakan pelatihan/lokakarya bagi pengelola Kabupaten/Kota maupun Desa.
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- f. Menyampaikan usulan Kabupaten/Kota kepada TKPK untuk dibahas dan ditetapkan alokasi dananya.
- g. Menyampaikan laporan pengembangan program dan hasil monitoring kepada TKPK Propinsi secara berkala.
- h. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi program Gerdu-Taskin.
- i. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/LSM dalam rangka pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.

### 3) Tim Pendamping Propinsi (TPP)

Tim pendamping Propinsi (TPP) adalah tim pendukung TKPK dan Sektap Propinsi dalam pengelolaan Program Gerdu-Taskin. TPP terdiri dari tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pengembangan masyarakat yang berasal dari LSM/Perguruan Tinggi. Tugas dan tanggungjawab TPP meliputi:

- a. Mendampingi TKPK dan Sektap dalam mengelola Program Gerdu-Taskin Propinsi.
- b. Membantu perumusan kebijakan program Gerdu-Taskin, terutama dalam bentuk Pedoman Umum dan Petunjuk teknis Operasional.
- c. Bersama-sama Sektap Propinsi menyiapkan pengadaan tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga pendamping Masyarakat (KTPM).
- d. Melatih Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat.
- e. Melakukan pengorganisasian dan pengendalian TPM-KTPM.
- f. Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan pendampingan kepada TKPK dan Sektap Propinsi secara berkala.
- g. Bersama-sama Sektap Propinsi dan TKPK Propinsi memfasilitasi penanganan kasus yang terjadi.

### b) Organisasi Pengelola Kabupaten/Kota

#### 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota

TKPK-Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota.

TKPK-Kabupaten/Kota secara fungsional dikoordinasikan oleh Bappekab/Bappeko. Dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota masing-masing dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Propinsi.
- b. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Gerdu-Taskin Kabupaten/Kota dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk teknis Operasional Propinsi.
- c. Menetapkan Rencana kegiatan Pengelolaan Program Gerdu-Taskin beserta dukungan operasionalnya.
- d. Menetapkan dana penyertaan (*sharing*) dan dana pendamping (*matching*) serta mendorong realisasinya pada APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung Program Gerdu-Taskin.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- f. Mengkoordinasikan peran dinas, instansi, lembaga, maupun *stakeholders* lainnya dalam pelaksanaan program.
- g. Melaporkan pelaksanaan program Gerdu-Taskin kepada Bupati/Walikota maupun kepada TKPK Propinsi secara berkala maupun insidental.

## 2) Sekretariat Tetap (Sektap) Kabupaten/Kota

Sektap Kabupaten/Kota adalah pelaksana kegiatan program Gerdu-Taskin di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TKPK. Struktur organisasi Sektap paling tidak terdiri atas Ketua dibantu dengan bidang-bidang, yakni:

- a. Bidang program
- b. Bidang administrasi dan keuangan
- c. Bidang monitoring dan pelaporan.

Sektap Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor Bagian Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas dan tanggungjawab:

- a. Memberikan data dan informasi kepada TKPK Kabupaten/Kota untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- b. Mengelola dan menyalurkan dana program Gerdu-Taskin kepada Desa.

- c. Menyelenggarakan pelatihan/lokakarya bagi pengelola program Gerdu-Taskin Desa.
- d. Melaksanakan verifikasi usulan kegiatan Desa.
- e. Menyampaikan usulan kegiatan Desa hasil verifikasi kepada Sektap Propinsi dalam bentuk LK.
- f. Melakukan monitoring pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- g. Menyampaikan laporan perkembangan program dan hasil monitoring kepada TKPK-Kabupaten/Kota secara berkala.
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan hasil monitoring program Gerdu-Taskin kepada Gubernur. Sektap Propinsi secara berkala maupun insidental selama pelaksanaan program.
- i. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kepada UPK dan Pokmas UEP selama pelaksanaan program maupun pasca program.
- j. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Program Gerdu-Taskin.

### 3) Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)

KTPM adalah merupakan tenaga pendukung TKPK dan Sektap dalam pengelolaan program Gerdu-Taskin di Kabupaten/Kota, yang disediakan oleh Tim Pendamping Propinsi. Tugas dan tanggungjawab KTPM, meliputi:

- a. Mendampingi TKPK dan Sektap dalam mengelola Program Gerdu-Taskin Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
- b. Memberikan masukan kepada TKPK dan Sektap dalam pembuatan kebijakan lokal Program Gerdu-Taskin.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh TPM di wilayah tugasnya.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada TPM dalam melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat di Desa.

- e. Membantu TPP dalam melakukan pengendalian kinerja TPM.
- f. Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan pendampingan program Gerdu-Taskin di wilayah tugasnya kepada TPP secara berkala dengan tembusan TKPK dan Sektap Kabupaten/Kota.
- g. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan dan pengembangan program.
- h. Bersama-sama dengan Sektap dan TKPK Kabupaten/Kota memfasilitasi penanganan kasus yang terjadi.

#### 4) Tenaga Fasilitasi Kecamatan (TFK)

Tenaga Fasilitasi Kecamatan (TFK) adalah bagian dari Sektap Kabupaten/Kota yang berada di Kecamatan, dan bertugas memberikan bimbingan, monitoring serta bantuan teknis yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program Gerdu-Taskin di Desa.

TFK adalah Kasi PMD atau Kasi yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Tugas dan tanggungjawab TFK, meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program Gerdu-Taskin di Desa.
- b. Bersama TPM memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi lainnya dengan kebutuhan masyarakat Desa.
- c. Membantu Sektap Kabupaten/Kota dalam monitoring pelaksanaan program.
- d. Melaporkan kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan monitoring yang telah dilaksanakan kepada Sektap Kabupaten/Kota secara berkala.

#### 5) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

TPM adalah tenaga yang mendampingi UPK dan Pokmas dalam melaksanakan kegiatan Gerdu-Taskin di Desa. Tugas dan tanggungjawab TPM meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Program Gerdu-Taskin di Desa.

- b. Memfasilitasi UPK dalam mengklarifikasi dan mengklasifikasikan RTM.
- c. Memfasilitasi UPK dalam mengidentifikasi usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan RTM maupun masyarakat Desa.
- d. Memfasilitasi kegiatan perencanaan untuk penentuan skala prioritas usulan Desa.
- e. Memfasilitasi penulisan usulan Desa.
- f. Memantau pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana program di Desa.
- g. Memfasilitasi UPK dalam, pelayanan usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- h. Memberikan bimbingan administrasi organisasi dan keuangan UPK.
- i. Memberikan dukungan bagi pengelolaan usaha RTM dan kegiatan Timlak.
- j. Memfasilitasi penyusunan laporan berkala oleh UPK dan Timlak.
- k. Memfasilitasi UPK dan Timlak dalam pertanggungjawaban dan pelestarian program.
- l. Membantu pengumpulan data lapang untuk keperluan evaluasi program.
- m. Melakukan koordinasi dengan TFK berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- n. Melaksanakan pelaporan secara berkala kepada KTPM berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- o. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan dan pengembangan program.
- p. Mendokumentasikan dan menyebarkan *the best practices* hasil pendampingan

### c) Organisasi Pengelola Desa

#### 1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penanggungjawab pengelolaan program di Desa. Tugas Pemerintah Desa dalam hal ini:

- a. Bertanggungjawab menyediakan sarana prasarana UPK berupa ruang sekretariat dan inventaris.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi program Gerdu-Taskin ditingkat Desa.
- c. Bersama BPD menetapkan lembaga UPK dalam bentuk Perdes. Untuk Kelurahan lembaga UPK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kelurahan.
- d. Menetapkan pengurus UPK melalui keputusan Kepala Desa.
- e. Memfasilitasi kegiatan klasifikasi-klasifikasi RTM, identifikasi kebutuhan dan musyawarah Desa.
- f. Mendukung pengembangan kegiatan usaha UPK
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan UPK.
- h. Menjamin keberlanjutan program.

#### 2) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK adalah pengelola program Gerdu-Taskin di Desa. UPK dibentuk melalui musyawarah Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) sedangkan untuk Kelurahan ditetapkan melalui keputusan Kepala Kelurahan. Apabila di Desa lokasi sudah terdapat lembaga ekonomi milik pemerintah Desa sejenis UPK, maka sepanjang lembaga tersebut fungsional, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka dapat difungsikan sebagai UPK Program Gerdu-Taskin.

Struktur organisasi UPK terdiri dari Unsur Pengurus dan Unsur Pengawas. Unsur pengurus terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang Bendahara. Sedangkan unsur pengawas terdiri dari Kepala Desa, ketua BPD dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat

yang dipilih melalui musyawarah Desa. Unsur pengurus UPK dipilih berdasarkan kriteria:

- a. Warga Desa setempat yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggungjawab.
- b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun.
- c. Pendidikan minimal SLTP sederajat, dan khusus untuk yang menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA.
- d. Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
- e. Bukan aparat pemerintah Desa maupun unsur BPD.
- f. Bukan anak dan atau istri Kepala Desa.
- g. Dapat berasal dari Kader pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Tugas dan tanggungjawab pengurus UPK, meliputi:

- a. Melakukan klarifikasi dan klasifikasi RTM.
- b. Memfasilitasi identifikasi usulan kegiatan pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan.
- c. Mengajukan usulan kegiatan Desa kepada Sekdap Kabupaten/Kota.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa.
- e. Melaksanakan pelayanan usaha simpan pinjam dan pengembangan usaha sektor riil.
- f. Melakukan analisis kelayakan usaha dan kelayakan peminjam serta menetapkan persetujuan dana pinjaman.
- g. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam dan pengelolaan kegiatan lainnya.
- h. Melakukan perjanjian pinjaman maupun dengan pihak lain dalam bentuk akad.
- i. Mengelola usaha UPK secara sehat dan professional.
- j. Mempertanggungjawabkan pengelolaan program secara administratif maupun publik serta pelestariannya.
- k. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi UPK sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum.
- l. Memberikan dukungan pengembangan usaha RTM.

- m. Mendokumentasikan kegiatan TRIDAYA.
- n. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha kepada Sektap Kabupaten/Kota secara berkala.
- o. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping maupun pengelola program Gerdu-Taskin.

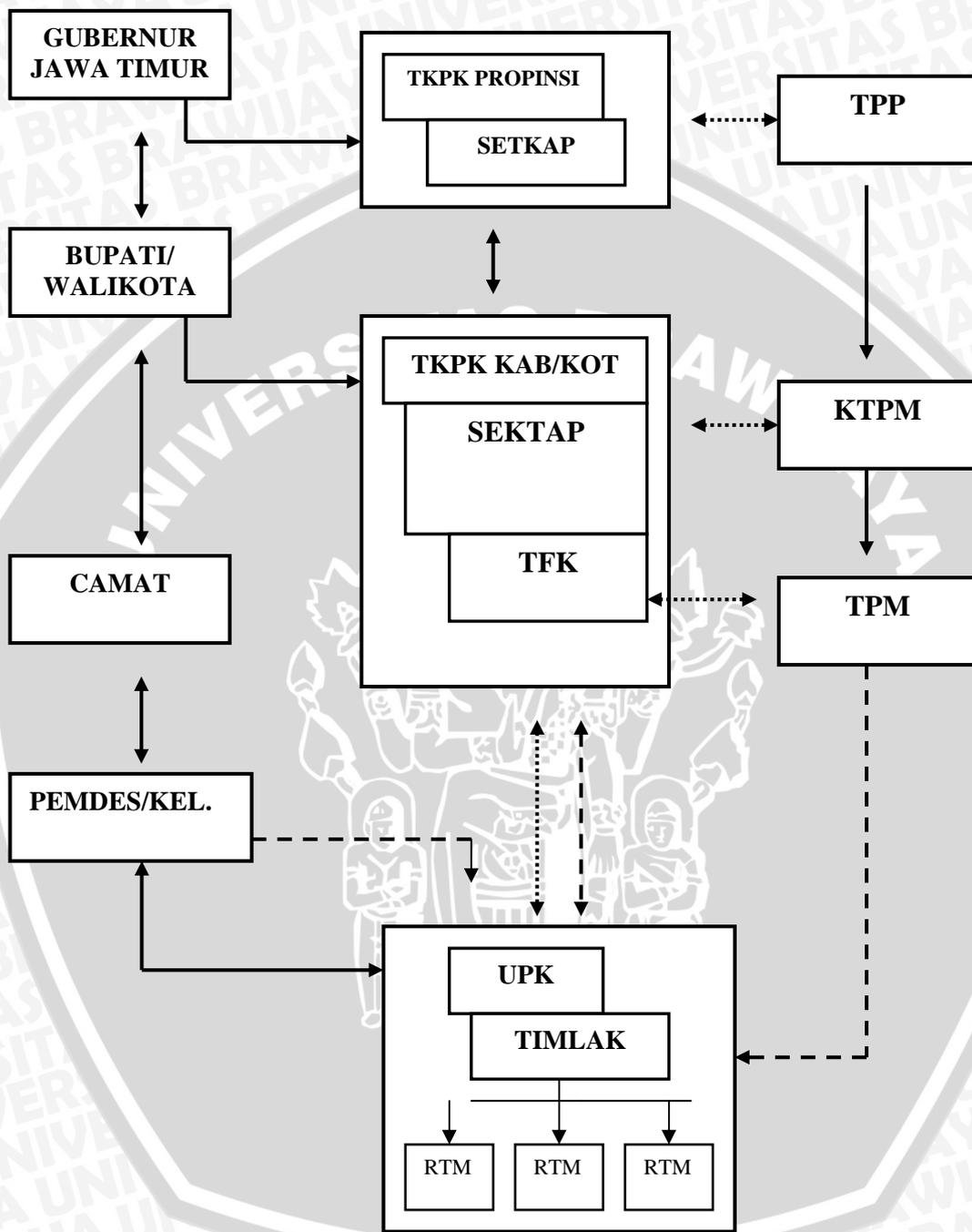
### 3) Tim Pelaksana (Timlak)

Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan. Timlak dibentuk melalui Musyawarah Desa dan dipilih dari unsur pengurus LPMD atau sebutan lain, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Susunan Timlak sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara, dan anggota. Tugas dan tanggungjawab Timlak, meliputi:

- a. Membuat rencana kerja teknis pelaksanaan kegiatan beserta RAB-nya, yang selanjutnya diajukan ke UPK untuk dibahas.
- b. Memberikan penjelasan dalam pembahasan Rencana Kerja dan RAB bersama UPK, pemerintah Desa, BPD, dan wakil RTM yang terkait dengan program.
- c. Memobilisasi potensi swadaya masyarakat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengelola pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia.
- e. Melaporkan kemajuan kegiatan secara berkala kepada UPK.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis kepada UPK.

Hubungan fungsional dan struktural antar organisasi pengelola program Gerdu-Taskin di atas dapat diskemakan sebagaimana Bagan 3 di bawah ini:

### Bagan 3 Struktur Organisasi Pengelola Program Gerdu-Taskin



Keterangan:

- Garis hubungan struktural
- ..... Garis hubungan konsultasi dan koordinasi
- - - - - Garis hubungan fasilitasi dan pendampingan

Sumber: Pedoman Umum Gerdu-Taskin 2004



### C. Hasil Penelitian

#### 1. Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar

##### 1) Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan, Musyawarah Desa (Perencanaan) dan Sosialisasi.

Perencanaan dilakukan untuk menyusun usulan kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggarannya. Kegiatannya meliputi:

Klarifikasi RTM adalah kegiatan mengecek kesesuaian data RTM (Rumah Tangga Miskin) hasil PKIB BPS (Perkiraan Kemiskinan Indikator Baru Badan Pusat Statistik) 2001 Propinsi Jawa Timur pada masing-masing Desa lokasi program sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Kegiatan klarifikasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Diskusi kelompok terfokus
- b. Musyawarah di tingkat RT/RW/Dusun
- c. Melakukan pengamatan secara langsung dan menanyakan kepada RTM
- d. Bentuk-bentuk lainnya.

Klarifikasi RTM pada Desa Plandirejo dilakukan dengan diskusi kelompok terpadu, musyawarah di tingkat RT/RW dengan rincian 25 RT dan 6 RW. Kegiatan ini menghasilkan adanya 120 KK yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM). Klarifikasi yang dilakukan oleh RT/RW ini kemudian direkomendasikan kepada Pemerintah Desa dan didiskusikan pada musyawarah desa kemudian data dari Pemerintah Desa tersebut diserahkan oleh UPK untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Tridaya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Gazzalli selaku Ketua UPK Gerdu-Taskin Desa Plandirejo 2004:

“... darimana kami mendapatkan data mengenai RTM itu dari desa mbak, tentunya desa mendapatkan data tersebut dari RT/RW dari masing-masing Dusun. Mengenai klarifikasi RTM itu sendiri, RT/RW tidak menggunakan kriteria yang macam-macam, RT/RW tersebut menentukanarganya layak atau tidak untuk menjadi kelompok

sasaran dengan melihat pengalaman RTM, usaha yang dijalankan, dan kepribadian dari warganya”. (Wawancara 02 Maret 2008 pukul 12:10 WIB)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Siswandi selaku bendahara UPK sebagai berikut:

“ Klarifikasi RTM di masing-masing desa gak sama mbak, kalo disini dilakukan oleh masing-masing RT/RW jauh sebelum diadakan musyawarah di desa, kemudian diserahkan ke desa dan diumumkan dalam musyawarah. Kalo ditanya mengenai indikator yang digunakan untuk melihat warga di sini miskin ato enggak, itu tergantung dari masing-masing RT/RW. Salah satu contoh di tetangga kami ada seorang janda yang rumahnya secara fisik tidak layak, seperti rumahnya terbuat dari bambu, akan tetapi memiliki tanah yang lumayan luas yang ditanami pohon jati. Jadi RT/RW mengklarifikasikan RTM juga dengan melihat pengalaman, dan usaha dari warganya masing-masing, selain itu data yang diklarifikasi dari pkib BPS Tahun 2001 tersebut sudah akurat mbak”. (Wawancara 29 Nopember 2007).

Klasifikasi RTM adalah kegiatan untuk mengelompokkan RTM hasil klarifikasi di masing-masing Desa ke dalam dua kategori, yakni Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) dan Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R). RTMB adalah RTM yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP), yakni RTM yang telah memiliki usaha, atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru, atau RTM yang tidak memiliki usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha. RTMB ini merupakan penerima manfaat kegiatan pemberdayaan usaha dalam bentuk pinjaman modal usaha. RTMB selanjutnya secara ditunjuk untuk membentuk kelompok (Pokmas) sebagai persyaratan pengajuan pinjaman. RTM-R adalah RTM yang tidak memiliki keberdayaan oleh sebab-sebab tertentu seperti usia lanjut, penderita penyakit menahun, mengalami cacatan permanen yang menyebabkan tidak mampu menjalankan aktifitas produktif. Kepada kategori RTM ini dialokasikan santunan sosial untuk mengurangi beban hidup, peningkatan mutu hidup dan peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan manusia. Klasifikasi RTM dilaksanakan

dengan memilih terlebih dahulu RTM yang berkategori rentan. Sedangkan sisanya langsung masuk ke dalam kategori RTMB. Klasifikasi RTM di Desa Plandirejo juga dilakukan dengan diskusi kelompok terpadu, musyawarah di tingkat RT/RW dengan rincian 25 RT dan 6 RW. Klasifikasi RTM menghasilkan 140 nama penerima manfaat kegiatan pemberdayaan manusia (RTMR) dengan rincian 56 orang laki-laki dan 84 orang perempuan dan untuk pemberdayaan manusia (RTMB) dengan rincian 9 Pokmas, 80 orang, terdiri dari 42 orang laki-laki dan 38 orang perempuan.

Pada dasarnya klarifikasi maupun klasifikasi RTM merupakan kegiatan mengecek kesesuaian data RTM hasil PKIB 2001 yang akan menghasilkan RTMB yang diharapkan agar secara sukarela membentuk kelompok (Pokmas) sebagai persyaratan pengajuan pinjaman, akan tetapi warga Desa Plandirejo yang tergolong RTM ternyata tidak mau membentuk Pokmas. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tergolong RTM tidak berani untuk meminjam dengan alasan takut tidak dapat mengembalikan pinjaman. Masyarakat tersebut memiliki anggapan seperti itu dikarenakan pada awal program Gerdu-Taskin ini dilaksanakan, kurangnya sosialisasi bagi masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gazzali selaku Ketua UPK Plandirejo, berikut pernyataannya:

“ ...mengenai masalah klasifikasi maupun klarifikasi RTM, kami sudah memiliki data dari BPS mbak, lalu diadakan musyawarah di Desa, dalam musyawarah tersebut, Desa memperoleh keterangan tentang jumlah RTM dari RT/RW, setelah itu dalam musyawarah pra pelaksanaan, dipilih siapa-siapa yang menjadi ketua Pokmas ditunjuk oleh Desa. Jadi kami mendapatkan data tentang masyarakat yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut dari desa ketika musyawarah. kami memilih pertimbangan seperti itu karena masyarakat Desa sini tidak ada yang mau meminjam dengan alasan takut jika tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Kami sadar akan hal itu, karena memang informasi mengenai program ini sangat terbatas pada pengurus saja, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi maupun pendampingan. Kurangnya sosialisasi disini disebabkan keterbatasan waktu dan biaya, karena kami tahu kalau Desa ini dapat dana Gerdu-Taskin pada bulan April dan program ini benar-benar dilaksanakan pada bulan Juli selain itu juga adanya peran yang dominan dari pemerintah desa khususnya Kepala Desa. Seharusnya kegiatan ini

diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat di desa, akan tetapi Kepala Desa terlalu jauh mencampuri dan semua keputusan ada pada Kepala Desa tersebut misalnya saja dalam hal musyawarah, yang ikut serta dalam musyawarah itupun orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa". (Wawancara tanggal 12 Desember 2007).

Identifikasi kebutuhan adalah aktifitas menggali usulan-usulan kegiatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia, dan pemberdayaan lingkungan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa, terutama RTM. Identifikasi kebutuhan kegiatan pemberdayaan lingkungan dilakukan melalui pertemuan Dusun/RT/RW/PKK, kelompok tani, jamaah tahlil dan lainnya, yang dipastikan ada kehadiran dan keterlibatan RTM. Apabila di Desa lokasi memiliki dokumen perencanaan pembangunan fisik yang dirumuskan secara partisipatif dan belum dilaksanakan, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sejenisnya, maka dokumen tersebut dapat digunakan sebagai usulan kegiatan pemberdayaan lingkungan yang akan ditetapkan dalam Musdes/Kel. Identifikasi kebutuhan kegiatan pemberdayaan manusia dilakukan melalui pertemuan khusus RTM-R, dan diarahkan untuk menggali kebutuhan sesuai dengan aspirasi RTM-R meliputi:

- a. Penyediaan seragam sekolah, alat tulis, dan buku penunjang bagi anak keluarga RTM-R.
- b. Bantuan sarana pendidikan bagi lembaga yang tidak memperoleh bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- c. Perbaikan gizi keluarga RTM-R.
- d. Lain-lain kegiatan untuk meringankan beban hidup RTM-R.

Identifikasi kebutuhan untuk kegiatan pemberdayaan lingkungan lebih diprioritaskan pada kegiatan yang bermanfaat langsung bagi RTM-R seperti:

- a. Perbaikan/pengadaan sarana rumah tinggal RTM-R

- b. Penyediaan prasarana air bersih, MCK dan sanitasi. Prioritas berikutnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas fisik yang menunjang pengembangan ekonomi Desa.

Identifikasi kebutuhan untuk kegiatan usaha Sektor Riil UPK dilakukan melalui pertemuan antara UPK dan pemerintahan Desa difasilitasi oleh TPM, dengan agenda:

- a. Pembahasan jenis usaha dan prospek pengembangan usaha UPK
- b. Pembahasan pola pengelola usaha. Kegiatan yang dipilih diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa.

Hasil identifikasi kebutuhan selanjutnya ditetapkan dalam Musdes Perencanaan sebagai Daftar Kebutuhan Masyarakat Miskin (DKMM). Selanjutnya DKMM dibahas untuk menentukan skala prioritas usulan Kegiatan Desa yang akan didanai melalui program Gerdu-Taskin.

Musdes Perencanaan adalah musyawarah dan sosialisasi tentang program kepada masyarakat, dimana masyarakat diundang untuk hadir di Balai Desa. di Desa yang dihadiri oleh perwakilan RTM yang ditunjuk, wakil tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan, wakil kelompok/organisasi perempuan, wakil pemerintah Desa, BPD, LPMD atau sebutan lain. Agenda Musdes Perencanaan meliputi:

- a. Pemaparan hasil identifikasi kebutuhan kegiatan PM dan PL dari masing-masing Dusun/RT/RW
- b. Menetapkan DKMM
- c. Pembahasan skala prioritas kegiatan
- d. Penetapan usulan kegiatan Tri Daya yang akan didanai program Gerdu-Taskin
- e. Pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK)
- f. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak)
- g. Penjelasan tata cara pelayanan simpan pinjam di UPK.

Musdes Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan Program Gerdu-Taskin Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2004 di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar pada tanggal 21-28

April, Pukul 09.00-11.30 WIB di Balai Desa Plandirejo yang dihadiri 48 orang perwakilan warga masyarakat, TPM,TFK, SEKTAP, serta unsur masyarakat yang tertarik dan berkepentingan dengan upaya pengentasan kemiskinan.(Berita Acara Musdes Perencanaan, April 2004)

## 2) Pelaksanaan Kegiatan Tridaya & Pencairan Dana

Kegiatan selanjutnya setelah Klarifikasi RTM, K lasifikasi RTM dan Musyawarah Desa, maka selanjutnya adalah pencairan dana. Ketentuan mengenai pencairan dana diatur dalam pedoman umum Gerdu-Taskin Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a) Penyaluran dana Gerdu-Taskin yang bersumber dari APBD Propinsi disalurkan ke Rekening Bupati/Walikota atas nama jabatan melalui Bank Jatim, yang selanjutnya dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat selaku Sektap Program Gerdu-Taskin Kabupaten/Kota.
- b) Dana Gerdu-Taskin dari APBD Propinsi dapat dicairkan apabila masing-masing Kabupaten/Kota telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan rekap usulan Desa dengan dilampiri:
  - 1) Hasil verifikasi usulan masing-masing Desa
  - 2) *Copy* nomor rekening Bupati/Walikota atas nama jabatan
  - 3) *Copy* Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Kabupaten/Kota tentang alokasi dana penyertaan (*sharing*) dan dana pendamping (*matching grant*), apabila Kabupaten/Kota belum mengalokasikan dana penyertaan, diharuskan menyertakan Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- c) Dalam upaya mempercepat proses pencairan dana, Bupati/Walikota dapat memberikan surat kuasa pencairan kepada Sektap.
- d) Alokasi dana program Gerdu-Taskin yang dikelola langsung oleh masyarakat tidak dikenakan pajak (PPh, PPn), sedangkan untuk

BOP yang dikelola Kabupaten/Kota berlaku ketentuan perpajakan sebagaimana peraturan yang berlaku.

- e) Dana program Gerdu-Taskin paa rekening Bupati/Walikota segera ditransfer ke rekening Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Sektap paling lama 8 hari kerja.
- f) Dana BLM untuk kegiatan Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Biaya Operasional Kegiatan di Desa segera ditransfer ke rekening UPK dan tidak boleh mengendap di rekening Sektap Kabupaten/Kota lebih dari 6 hari kerja.
- g) Sektap Kabupaten/Kota, TPM, KTPM, dan TFK perlu melakukan pemantauan penyaluran dana oleh UPK baik dalam bentuk pinjaman modal Pokma, pembiayaan usaha sektor riil, dana kegiatan pemberdayaan manusia, maupun dana kegiatan pemberdayaan lingkungan.
- h) Dana penyertaan (sharing) dari APBD Kabupaten/Kota untuk pemberdayaan lingkungan dicairkan bersamaan dengan dana APBD Propinsi dan dapat dicairkan sekaligus atau secara bertahap.
- i) Penyaluran dana pinjaman maupun dana usaha sektor riil diatur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan realisasi dana dari UPK ke Timlak dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan syarat menyerahkan rincian rencana penggunaan dana dan laporan realisasi penggunaan dana termin sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai ketentuan pencairan dana, maka dapat diketahui bahwa dalam rangka optimalisasi program Gerdu-Taskin dibentuklah Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai lembaga keuangan dan lembaga usaha serta fungsi lainnya sesuai dengan kegiatan pemberdayaan yang sedang dilakukan. Pada kegiatan pemberdayaan usaha pada sektor simpan pinjam, UPK berperan sebagai lembaga yang memberikan pinjaman sekaligus lembaga yang menentukan RTM yang nantinya akan mendapatkan pinjaman.

Dalam pelaksanaan kegiatan Gerdu-Taskin, maka diperlukan anggaran dana yang lengkap dan jelas. Berdasarkan data profil UPK Plandirejo anggaran dana pada pelaksanaan Gerdu-Taskin tahun 2004, adalah sebagai berikut:

#### **Sumber dana**

Dana dari Propinsi	Rp. 85.569.000,00
APBD	Rp. 57.046.000,00
BOP	<u>Rp. 4.000.000,00</u> +
Jumlah	Rp.146.615.000,00

#### **Rincian alokasi dana**

a. BOP	Rp. 4.000.000,00
b. Pemberdayaan usaha	
1) Usaha simpan pinjam	Rp. 63.000.000,00
2) Usaha sekor riil	Rp. 0
c. Pemberdayaan manusia	Rp. 29.100.000,00
d. Pemberdayaan lingkungan	
1) Sumber dana APBD Propinsi	Rp. 30.309.000,00
2) Sumber dana APBD Kabupaten	Rp. 20.206.000,00

Berdasarkan rincian alokasi dana pada UPK Plandirejo di atas, memperlihatkan bahwa alokasi dana mencakup pada kegiatan Tridaya. Berikut ini adalah berbagai bentuk kegiatan Tridaya tersebut:

#### **a) Pemberdayaan Manusia**

Ketentuan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Manusia diatur sesuai dengan pedoman Gerdu-Taskin tahun 2004 seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Dana pemberdayaan manusia khusus dialokasikan untuk kelompok miskin rentan (RTM-R). Realisasi penggunaan dana pemberdayaan manusia tidak harus meliputi seluruhnya, melainkan dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
- 2) Kegiatan pemberdayaan manusia untuk kebutuhan dasar RTM-Rentan diberikan secara hibah. UPK dapat menyusun sistem

pemberian bantuan kebutuhan dasar sedemikian rupa sesuai kesepakatan agar pola pemberian bantuan tepat sasaran, tepat perlakuan dan memandirikan RTM-R.

- 3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan manusia untuk jenis bantuan dan kelompok sasaran harus dihindari agar tidak tumpang tindih dengan bantuan dari program lain, seperti bantuan Raskin, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.

Kegiatan Pemberdayaan Manusia Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar ialah kegiatan plesterisasi, pemberian bantuan bea siswa dan pemberian santunan kesehatan yang tersebar di semua dusun di wilayah Desa Plandirejo. Berdasarkan data dari UPK Plandirejo, diketahui bahwa penerima manfaat tersebut meliputi 3 dusun yaitu Dusun Wonorejo, Dusun Sidorejo dan Dusun Ngadirejo. Adapun jenis dan volume kegiatan Pemberdayaan manusia berupa: plesterisasi terhadap 80 KK RTMR, pemberian bantuan beasiswa kepada 30 anak dari 30 KK RTMR, dan pemberian santunan kesehatan kepada 30 KK RTMR.

Kegiatan pemberdayaan manusia ini dilaksanakan oleh Timlak yang dibentuk pada saat Musyawarah Desa Pra Pelaksanaan. Timlak membuat rencana kegiatan dan merealisasikan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan usulan yang telah disepakati. Kemudian Timlak memberikan laporan berkala maupun laporan akhir pertanggungjawaban di akhir program. Adapun laporan keuangan kegiatan pemberdayaan Manusia UPK Plandirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Laporan keuangan Program Pemberdayaan Manusia Gerdu-Taskin  
Desa Plandirejo Tahun 2004

1. kegiatan pemberdayaan manusia						
No	Jenis kegiatan	lokasi	biaya	Penerima manfaat (jiwa)		
				L	P	Jml
1	Plesterisasi	Di 3 Dusun	17.100.000	34	46	<b>80</b>
2	Bantuan Beasiswa	Di 3 Dusun	4.500.000	12	18	<b>30</b>
3	Santunan Kesehatan	Di 3 Dusun	7.500.000	10	20	<b>30</b>
Jumlah			<b>29.100.000</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>140</b>

Sumber: Laporan keuangan UPK Desa Plandirejo Tahun 2004

Anggaran biaya untuk kegiatan pemberdayaan manusia ini berjumlah Rp.29.100.000,- (*dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*) yang akan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang secara rinci sebagaimana terlampir dalam **form 3**.

#### b) Pemberdayaan Lingkungan

Ketentuan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan diatur sesuai dengan pedoman Gerdu-Taskin tahun 2004 seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Dalam upaya mengoptimalkan partisipasi dan pendayagunaan potensi swadaya masyarakat, maka prioritas jenis kegiatan pemberdayaan lingkungan sedapat mungkin dipilih yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak di masing-masing Desa.
- 2) Kegiatan pemberdayaan lingkungan harus dilaksanakan secara swakelola oleh Timlak, dan tidak boleh dilaksanakan dengan pola rekanan.
- 3) Guna menghimpun potensi swadaya dan mendayagunakan sumber daya lokal yang ada, untuk penyediaan bahan dan tenaga kerja seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Desa bersangkutan.

- 4) Timlak melakukan pengadministrasian secara baik terhadap setiap realisasi penggunaan dana maupun perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan tenaga kerja.

Tujuan utama pemberdayaan lingkungan adalah penyediaan prasarana rumah tinggal RTM-R dan lingkungannya, peningkatan fasilitas umum serta pengembangan kebutuhan prasarana/sarana ekonomi Desa dengan pola padat karya. Berdasarkan laporan keuangan dari UPK Plandirejo, alokasi dana untuk Pemberdayaan lingkungan berasal dari sumber dana APBD Propinsi sebesar Rp. Rp. 30.309.000,00, dan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. Rp. 20.206.000,00, jadi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.515.000,00.

Bentuk dari Pemberdayaan lingkungan adalah kegiatan Pengerasan jalan, pembangunan Jembatan plengseng, pembangunan WC dan KM umum dan pembangunan Plengsengan jalan Dusun. Adapun laporan kegiatan pemberdayaan lingkungan Desa Plandirejo dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6. Laporan Program Pemberdayaan Lingkungan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo Tahun 2004

No	Judul Kegiatan	Ruang Lingkup	Prioritas	Besaran Biaya (Rp)
1	Plengsengan jalan Dusun	1x40m, semua warga	Dsn. Sidorejo	12.540.000
2	Jembatan plengseng	70cmx3x8m, semua warga	Dsn. Wonorejo	7.875.000
3	WC dan KM umum	2 WC dan 1 KM, semua warga	Pasar Desa	4.000.000
4	Pengerasan jalan	3000 meter, semua warga	Dsn. Ngadirejo, Sidorejo	26.100.000
Jumlah				<b>50.515.000</b>

Sumber: Laporan keuangan UPK Desa Plandirejo Tahun 2004

### c) Pemberdayaan Usaha

Ketentuan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha diatur sesuai dengan pedoman Gerdu-Taskin tahun 2004 seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Realisasi pinjaman dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan pinjaman yang telah disepakati bersama.
- 2) Realisasi pinjaman dengan menganut prinsip kehati-hatian, dan jika dipandang perlu dapat menerapkan persyaratan adanya jaminan/agunan.
- 3) Realisasi pinjaman yang layak didanai sesuai kebutuhan dan tidak menganut azas pemerataan, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman. Waktu pencairan dapat dilakukan secara bertahap, tidak harus dalam satu waktu yang bersamaan kepada para peminjam.

Agar UPK mampu mengelola usaha dan melestarikan kegiatan pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan secara optimal, maka dalam pelaksanaan program TPM dan KTPM melaksanakan pembimbingan dan konsultasi berkaitan dengan:

- a. Pengelolaan keuangan usaha simpan pinjam.
- b. Manajemen usaha.

- c. Mempersiapkan rencana pelestarian kegiatan pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan.

Pelaksanaan Program Gerdu-Taskin di Desa Plandirejo mulai dilaksanakan pada bulan April tahun 2004. Adapun untuk pelaksanaan program pemberdayaan usaha pada sektor simpan pinjam benar-benar terlaksana terhitung mulai bulan Juli tahun 2004, karena pada bulan April yaitu pada awal pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan klasifikasi RTM (RTMR dan RTMB). Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Gazzali selaku Ketua UPK Gerdutaskin Plandirejo.

“Sebenarnya program Gerdu-Taskin ini di mulai pada bulan April, akan tetapi pelaksanaan usaha simpan pinjam ini dimulai pada bulan Juli, karena dibulan awal itu kami gunakan untuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan Musyawarah Pra Pelaksanaan”.(wawancara tanggal 09 Januari 2008).

Berdasarkan rincian alokasi dana di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan usaha untuk kegiatan usaha simpan pinjam mendapatkan alokasi dana yang paling besar dalam hal pembiayaan yaitu sebesar Rp. 63.000.000,00 yang dicairkan pada tanggal 28 Juli 2004 melalui Bank (BRI Cabang) selanjutnya disalurkan ke masyarakat (Kelompok sasaran). Adanya proporsi yang cukup besar ini tentunya memberikan harapan yang cukup besar pula dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam.

Sebenarnya pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha meliputi kegiatan dalam usaha riil dan usaha simpan pinjam, akan tetapi UPK Desa Plandirejo hanya melakukan kegiatan simpan pinjam hal ini dilakukan karena masyarakat Desa Plandirejo belum mampu untuk melaksanakan program pemberdayaan usaha dalam sektor riil. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Gazzali selaku Ketua UPK Gerdu-Taskin Plandirejo

“... memang benar mbak, bahwa pemberdayaan usaha terdiri dari dua sektor yaitu sektor riil dan sektor simpan pinjam, akan tetapi kami dalam musyawarah Desa memutuskan untuk mengusulkan usaha simpan pinjam saja, hal ini dikarenakan kami merasa masyarakat belum mampu untuk melaksanakannya dan tidak ada potensi apapun

untuk usaha sektor riil di desa kami, karena masyarakat maupun pengurus UPK masih sama-sama belajar.” (wawancara tanggal 09 Januari 2008).

Pada awalnya, Kegiatan usaha simpan pinjam pada tahun 2003 merupakan pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan secara berkelompok kepada Pokmas UEP yang mengajukan pinjaman dan telah dinyatakan layak mendapatkan pinjaman oleh UPK. Dulunya pemberian pinjaman modal usaha tersebut dengan sistem tanggung renteng, yaitu terdiri atas beberapa orang yang akan mengajukan permohonan pinjaman hal ini diharapkan akan memberikan kebaikan dalam hal kerjasama antar anggota masyarakat. Adanya pembentukan kelompok tersebut diharapkan juga bisa menstimulasi masyarakat agar lebih berperan aktif dalam bermasyarakat. Akan tetapi mulai tahun 2004 setelah mendapat dana lagi peminjam bersifat individu tetapi masih terikat dengan Pokmas. Adapun kebijakan itu muncul karena berdasarkan pengalaman UPK pada bulan-bulan sebelumnya banyak mengalami kendala seperti adanya kemacetan angsuran. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Siswandi selaku bendahara UPK Plandirejo.

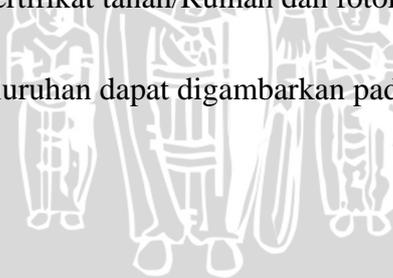
”mengenai kegiatan usaha simpan pinjam, dulunya kami menggunakan sistem tanggung renteng mbak, akan tetapi sistem administrasi pada waktu itu masih sederhana dan belum memiliki alat perlengkapan serta adanya kemacetan angsuran, maka setelah dapat dana lagi kami memutuskan untuk peminjam bersifat individu akan tetapi masih terikat Pokmas.” (wawancara tanggal 29 Nopember 2007).

UPK merupakan Pengelola modal pinjaman sebagai embrio lembaga keuangan mikro pedesaan. Dalam hal peminjaman, peminjam harus melalui beberapa tahapan. Adapun prosedur peminjaman meliputi: Pokmas UEP mengajukan permohonan pinjaman modal secara individu kepada RT/RW. Peminjam juga harus mendapatkan rekomendasi dari RT/RW setempat. Hasil rekomendasi tersebut kemudian diserahkan ke Desa dan UPK mengambil data tersebut dari Desa. Apabila sudah mendapatkan rekomendasi tersebut diteruskan

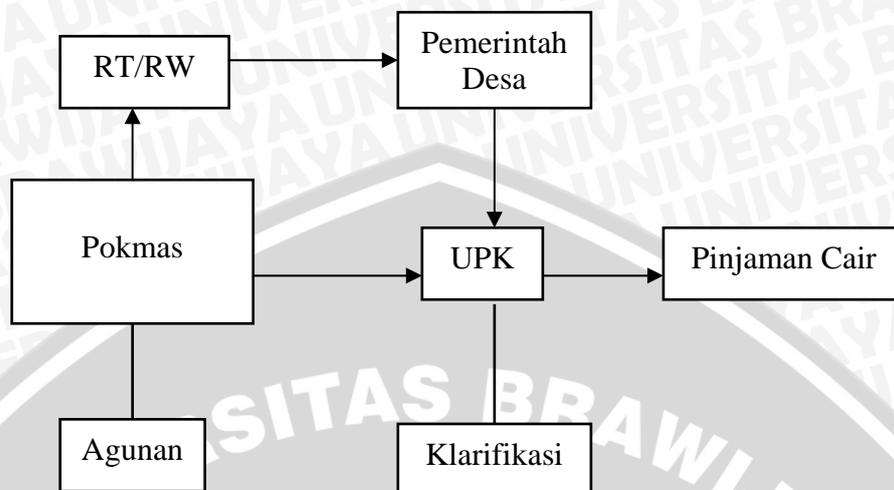
kepada UPK untuk diproses, adapun proses yang dilakukan UPK Plandirejo meliputi klarifikasi riwayat hidup peminjam seperti kepribadian, pengalaman dan usaha yang dimiliki; permohonan pinjaman dilampiri dengan rencana angsuran Pokmas UEP yaitu bunga yang harus ditanggung oleh peminjam adalah sebesar 2% dengan lama angsuran 10 kali; kemudian dianalisis kelayakan usahanya oleh UPK. Setelah usulan kegiatan UEP ini disetujui, sebelum pencairan dana kepada masing-masing Pokmas UEP dilaksanakan penandatanganan akad pinjaman antara Pokmas UEP dengan UPK sekaligus juga menyerahkan jaminan/agunan atas pinjaman tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Gazzali:

“ *Background* dari pinjaman ini dulunya yang menjadi ketua Pokmas itu ditunjuk dalam musyawarah desa yang mendapat rekomendasi dari RT/RW, kemudian kami sebagai pengurus UPK apabila ada Ketua Pokmas yang mengajukan pinjaman tinggal melakukan analisa kelayakan mbak, sebelumnya kami mendapatkan data tentang RTM dari musyawarah di desa. Kemudian analisa kelayakan dengan melihat usaha yang dimiliki atau jika belum memiliki usaha kami melihat dari kepribadian yang dimiliki apa dia mampu atau termotivasi untuk melakukan usaha yang produktif. Setelah itu kami melakukan persyaratan administrasi dengan, dengan mencantumkan surat perjanjian pinjaman, adanya jaminan/agunan seperti BPKB, sertifikat tanah/Rumah dan fotokopi KTP.

Secara keseluruhan dapat digambarkan pada bagan berikut.:



**Gambar 4**  
**Alur Peminjaman**



Sumber: Simpulan hasil wawancara dengan informan, 2007

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa peminjam harus melalui beberapa tahapan, namun ada sedikit perbedaan pada UPK Gerdu-Taskin Plandirejo, perbedaannya terletak pada peminjam itu sendiri, peminjam bukan orang yang termasuk dalam kriteria RTMB, akan tetapi peminjam berlaku bagi siapa saja yang ingin membutuhkan dana pinjaman tersebut. Hal itu telah disampaikan oleh Bapak Gazzali selaku Ketua UPK Gerdu-Taskin Plandirejo:

“ gini mbak seharusnya memang peminjam harus masuk dalam kriteria RTMB, akan tetapi yang termasuk RTMB tersebut tidak ada yang mau meminjam, karena mereka takut jika tidak bisa untuk mengembalikan pinjamannya, akhirnya kami memberikan pinjaman bagi siapa saja yang membutuhkan pinjaman. Dan kebanyakan warga yang meminjam tersebut kebanyakan warga yang mampu bukan RTM lagi karena meminjam itupun dengan alasan untuk penambahan modal, walaupun begitu prosedur peminjamannya masih mengikuti prosedur yang ada mbak ” (wawancara tanggal 09 Januari 2008).

Adapun laporan keuangan kegiatan pemberdayaan Usaha dalam sektor simpan pinjam Desa Plandirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Laporan Kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Gerdu-Taskin Desa Plandirejo Tahun 2004

2. kegiatan PU : Simpan Pinjam Pokmas UEP						
No	Nama Pokmas	Tanggal Pencairan Pinjaman	Anggota			Nominal Pinjaman
			L	P	Jml	
1	Wonorejo II	29 Juli 2004	5	-	5	Rp. 5.000.000,-
2	Sidorejo II	29 Juli 2004	5	-	5	Rp. 8.000.000,-
3	Sidorejo III	10 Agustus 2004	5	5	10	Rp. 6.500.000,-
4	Sidorejo IV	10 Agustus 2004	3	7	10	Rp. 5.000.000,-
5	Ngadirejo II	10 Agustus 2004	6	4	10	Rp. 5.000.000,-
6	Ngadirejo III	10 Agustus 2004	2	8	10	Rp. 8.000.000,-
7	Ngadirejo IV	10 Agustus 2004	3	7	10	Rp. 5.000.000,-
8	Wonorejo IV	29 Agustus 2004	4	6	10	Rp. 9.000.000,-
9	Wonorejo III	30 Agustus 2004	9	1	10	Rp. 6.800.000,-

Sumber: Laporan Kegiatan UPK Desa Plandirejo Tahun 2004

### 3) Hasil

#### a) Pendapatan UPK

Pada pelaksanaan program Gerdu-Taskin, tentunya diharapkan UPK sebagai lembaga keuangan mikro tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelaksana program, akan tetapi lebih dari itu, UPK juga sekaligus sebagai lembaga yang berorientasi profit yang diwujudkan dalam pemberdayaan usaha. Tentu saja hal itu dilaksanakan UPK untuk menjaga keberlangsungan lembaga dan keberlangsungan pemberdayaan usaha. Berdasarkan hasil wawancara bahwa usaha simpan pinjam yang dikelola UPK telah berjalan kurang lebih selama 24 bulan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dan cara peminjaman yang telah disebutkan sebelumnya ternyata UPK memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp. 28.308.900,00, jadi jika dijumlahkan dengan modal UPK sebesar Rp. 73.000.000, maka menjadi Rp. 101.308.900. (Laporan neraca UPK Plandirejo Per 31 Desember 2006). Hal ini menunjukkan bahwa UPK Plandirejo telah mampu memberikan pencairan dana sebesar Rp.79.125.000,00 bagi 9 Kelompok. Besarnya pinjaman tersebut yang paling tinggi sebesar Rp.9 000.000,00 untuk 10

orang. Secara keseluruhan, pendapatan UPK dapat dilihat pada lampiran 6. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Siswandi selaku bendahara UPK Plandirejo:

“ Sampai pada akhir tahun 2006 kami telah memberikan pinjaman sebesar Rp.79.125.000,00, sesuai dengan data statistik tanggal pembentukan 22 April 2004 dengan jumlah kelompok 9 yang terdiri dari 80 orang (38 wanita dan 42 Pria yang memiliki jenis usaha perdagangan, industri kecil dan pertanian. Sampai saat ini pinjaman tertinggi masih Rp. 9.000.000 untuk 10 orang mbak.” (Wawancara tanggal 29 Nopember 2007).

Berdasarkan fakta di atas maka keberadaan UPK yang seharusnya sebagai lembaga keuangan mikro yang diharapkan akan dapat memberikan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akan tetapi yang mendapat dana tersebut adalah warga yang tergolong mampu.

#### **b) Pengembangan Usaha dan Pendapatan Kelompok Sasaran**

Sebagai hasil dari adanya peminjaman dana bergulir yaitu usaha simpan pinjam, diharapkan terjadi adanya pengembangan usaha bagi kelompok sasaran. Beberapa warga yang menerima manfaat dari adanya pinjaman yaitu:

- 1) Ibu Hartini (42 tahun) warga Dusun Ngadirejo, RT 01 RW 06, keluarganya memiliki usaha dalam bidang pertanian dan pertukangan
- 2) Ibu Suyayuk (37 tahun) warga Dusun Wonorejo, RT 02 RW 03 memiliki jenis usaha pertanian
- 3) Ibu Binti Sulikah (28 tahun) warga Sidorejo, RT 01 RW 04 sebagai ibu rumah tangga.

Ketiga warga tersebut merupakan beberapa warga yang memperoleh pinjaman salah satunya yaitu Ibu Hartini sebagai istri kepala dusun Ngadirejo yang bekerja sebagai petani dan juga memiliki kerja sambilan dibidang pertukangan. Salah satu peminjam ini merupakan peminjam yang termasuk rutin dalam mengembalikan pinjaman beserta anggota kelompoknya. Alasan mengapa mereka

memutuskan untuk meminjam ternyata telah ditunjuk atas musyawarah Desa dan anggota kelompok dipilih oleh ketua kelompoknya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Hartini selaku ketua Pokmas Ngadirejo II :

“ kami tahu informasi tentang Gerdu-Taskin karena dikumpulkan di Desa untuk musyawarah mbak, terus kami disuruh membentuk kelompok ya kami mengikuti aturan dalam musyawarah tersebut dan kami membentuk kelompok dengan 10 anggota. Kami mendapat pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,00. Biasanya anggota kami kebanyakan bekerja sebagai pedagang sayur keliling, sehingga pinjaman yang diperoleh kami gunakan untuk modal usaha, dan Alhamdulillah sampai saat ini angsuran pinjamannya lancar dan kalau di tanya mengembang atau enggak ya sedikit mengembang mbak, kan ada tambahan modal otomatis ya ada sedikit perkembangan usaha, contohnya jumlah barang yang dijual jadi tambah banyak secara nominal, kira-kira dulu sebelum mendapat pinjaman pendapatan kami perbulan kira-kira 850 ribuan gitu dan sekarang menjadi 1 jutaan giti mbak”. (wawancara tanggal 20 Desember 2007).

Lain halnya dengan Ibu Suyayuk, beliau bekerja sebagai petani dan anggota kelompoknya kebanyakan bekerja dalam bidang pertanian, sehingga sering terjadi kemacetan angsuran, karena uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Suyayuk:

“ Awalnya kami memperoleh pinjaman itu sebesar Rp. 6.800.000 untuk 10 orang. Uang pinjaman tersebut kami gunakan untuk pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian. Jadi uang pinjaman itu langsung habis mbak setelah digunakan untuk membeli pupuk. Penghasilan tiap bulannya tidak tentu mbak, ya kalo mengandalkan tani saja mesti 3 bulan sekali mendapatkan uang, suami saya punya pekerjaan sambilan kadang-kadang *nyopir*. Kira-kira uang yang saya peroleh tiap bulannya 450 ribuan ”.(wawancara tanggal 20 Desember 2007).

Demikian juga dengan Ibu Binti Sulikah, Ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini menggunakan uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi uang tersebut digunakan untuk konsumsi, tidak digunakan untuk menambah modal usaha. Hal tersebut

sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Binti selaku anggota Pokmas Sidorejo III:

“Uang yang saya pinjam itu mbak, saya gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya dulu pinjam dari Pokmas sebesar Rp.400.000,00 dan diangsur 10 kali dengan bunga 2%, dengan bunga tetap. Mengenai penghasilan yang saya peroleh saya tidak menghasilkan apa-apa, karena yang bekerja itu suami saya mbak, sebagai buruh tani, kalo enggak gitu ikut orang kerja menggergaji kayu, biasanya tiap bulannya kira penghasilan yang diperoleh suami saya sekitar 300 ribu, tapi kadang-kadang juga gak sampe segitu”. (Wawancara tanggal 20 Desember 2007).

Hal tersebut sesuai dengan simpulan dari hasil wawancara maupun pengamatan peneliti mengenai pendapatan Pokmas sesudah dan sebelum melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:



Tabel 8. Perbandingan Pendapatan RTM

No.	Nama	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1.	Ibu Hartini (akumulasi pendapatan dari pertanian dan pertukangan)	850.000/bln (estimasi)	1.000.000/bln (estimasi)	ada tambahan pendapatan setelah meminjam
2.	Ibu Suyayuk (pendapatan dari pertanian saja)	450.000/bln (estimasi)	450.000/bln (estimasi)	Tidak ada tambahan pendapatan
3.	Ibu Binti Sulikah (Ibu rumah tangga/petani tidak tetap)	300.000/bln (estimasi)	300.000/bln (estimasi)	Tidak ada tambahan pendapatan

Sumber: Simpulan hasil wawancara dengan informan, 2007

Jadi, dari hasil wawancara maupun pengamatan yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam tidak mengalami pengembangan usaha maupun tambahan pendapatan, hal ini dikarenakan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi bukan untuk kegiatan usaha yang produktif.

#### 4) Pertanggungjawaban dan Pelestarian

Program Gerdu-Taskin Desa Plandirejo dipertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban administratif yaitu berupa laporan tertulis meliputi: laporan proses pelaksanaan program, hasil kegiatan serta realisasi dana penggunaan dana program dilampiri salinan/copy SPJ. Pelaporan ini sebenarnya dilaksanakan secara berkala tiap 3 bulan sekali oleh pengelola desa ke pengelola kabupaten, akan tetapi selama ini UPK Plandirejo belum pernah melakukan laporan berkala kepada Sektap Kabupaten yaitu Bapemas Kabupaten Blitar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Siswandi:

“ sebenarnya ya 3 bulan sekali kami harus laporan ke bapemas mbak, akan tetapi selama ini kami belum pernah datang ke Bapemas, kami datang ya kalo dipanggil...”. (Wawancara 29 Nopember 2007)

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Gazzali sebagai berikut:

“ kami membicarakan tentang program Gerdu-Taskin biasanya kalo ada musyawarah di desa mbak, biasanya kami menegur para pokmas yang menunggak pada waktu musyawarah, sampai saat ini kami belum pernah menagih para pokmas yang menunggak kerumahnya”. (Wawancara 02 Maret 2008).

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Suyayuk selaku Ketua Pokmas Wonorejo III sebagai berikut:

“ Kelompok kami sampai saat ini belum pernah didatangi para pengurus UPK mbak, terus terang anggota kami juga banyak yang menunggak, tapi saya sebagai ketua pokmas sudah sering menegur anggota-anggota saya untuk sebgera melunasi dana pinjaman tersebut”. (Wawancara 20 Desember 2007).

Pertanggungjawaban publik adalah penyampaian dan pembahasan laporan pelaksana program dalam forum publik, misalnya dengan musyawarah desa. Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian dan hasil dari wawancara pertanggungjawaban publik Desa Plandirejo dilaksanakan ketika ada musyawarah selain urusan tentang Gerdu-Taskin, hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban dilakukan jika ada sisa waktu setelah musyawarah untuk kepentingan yang lain telah berakhir.

Hasil-hasil kegiatan program Gerdu-Taskin berupa usaha simpan pinjam yang dikelola UPK, kegiatan pemberdayaan manusia, maupun fasilitas fisik yang telah dibangun merupakan aset milik desa diharapkan dikelola secara lestari dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat terutama RTM. Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, upaya pelestarian yang dilakukan oleh pihak UPK pada kegiatan simpan pinjam sehubungan dengan pengmbalian pinjaman hanya sebatas menegur Pokmas yang menunggak, itupun ketika ada musyawarah di desa.

## 2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dari Pelaksanaan Gerakan Terpadu pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya tidak selalu berjalan lancar. Kendala selalu menjadi pengiring pada setiap pelaksanaan kegiatan apapun. Termasuk program Gerdu-Taskin. Secara umum, kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan gerdu-Taskin dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:

### 1) Kendala dari UPK

#### a) Keanggotaan Pengurus UPK

UPK adalah Unit Pengelola Keuangan lokal masyarakat yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat Plandirejo yang berhak menilai usulan kegiatan yang sumber dananya dari Gerdu-Taskin. Pembentukan UPK dan kepengurusannya dimulai dari pembentukan Pokmas. Pemilihan pengurus UPK dilakukan di Balai Desa setempat yang dihadiri antara lain oleh TPM, TFK,SEKTAP, Kepala Desa, Pemuka masyarakat, dan Masyarakat umum.

Dalam proses tersebut memilih Ketua, Sekretaris, dan bendahara. Kurang lebih setahun berjalan, tepatnya bulan Desember 2006, ada perubahan kepengurusan. Berikut adalah nama-nama pengurus UPK Plandirejo:

- 1) Ketua UPK : Bapak Gazzali Mustofa
- 2) Sekretaris UPK : Bapak Sutrisno
- 3) Bendahara UPK : Bapak Siswandi

Tugas pokok dari UPK adalah berwenang penuh untuk menerima atau menolak proposal Pokmas, menyalurkan, dan mengendalikan dana Gerdu-Taskin yang disalurkan kepada Pokmas, di mana Pokmas di sini merupakan kelompok masyarakat miskin yang dengan melalui proposal yang diajukan kepada UPK, berhak

memperoleh pinjaman. Pembagian tugas pengurus UPK Plandirejo adalah:

- 1) Ketua, menjalankan tugas-tugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan UPK;
- 2) Sekretaris, membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan rapat-rapat pengurus. Disamping itu, sekretaris bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan;
- 3) Bendahara, bertugas menghimpun menyimpan dan menyalurkan dana bantuan serta mendistribusikan hasil dari keuntungan UPK. Dalam menghimpun dan menyimpan hasil dari keuntungan UPK disimpan pada rekening bank dengan ditanda tangani oleh ketua UPK.

Berdasarkan pengamatan selama melaksanakan penelitian, diketahui bahwa anggota atau pengurus UPK yang benar-benar aktif hanya 2 orang yaitu bapak Siswandi selaku bendahara dan Bapak Gazzali selaku ketua UPK. Dua orang pengurus yang aktifpun ternyata sering terjadi *overlapping* atau rangkap tugas. Adapun Timlak dari program ini hanya bersifat reaktif, maksudnya adalah ketika ada proyek tertentu, keberadaan Timlak sangat dibutuhkan. Akan tetapi setelah proyek Pemberdayaan Manusia dan Pemberdayaan Lingkungan telah selesai, maka keberadaan Timlak pun sudah tidak berfungsi lagi. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Gazzali selaku ketua UPK:

”Dulunya pengurus UPK disini ada tiga mbak, yaitu saya sendiri, Pak Sis ama Pak Tris. Namun Pak Tris pada saat itu lebih sibuk dengan proyek Pemberdayaan Lingkungan dan sekarang sudah selesai, kemudian beliau sudah tidak mau lagi mengurus usaha simpan pinjam ini dan mengundurkan diri tepatnya pada bulan Desember tahun 2006 kemarin. Jadi pekerjaannya Pak Tris sebagai sekretaris di gantikan oleh Pak Sis yang merangkap sebagai bendahara.”. (wawancara tanggal 09 Januari 2008).

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Siswandi selaku Bendahara UPK sebagai berikut:

“tugas yang seharusnya dilaksanakan Pak Tris, sudah lama saya yang mengerjakan. Seperti yang mbak lihat sekarang laporan untuk bulan Maret 2007 aja belum saya kerjakan. karena kami semua juga lebih memilih bekerja untuk anak-istri dari pada mikirin Gerdu-Taskin, lha gaji dari *ngurus* UPK tidak cukup untuk makan mbak, di sini setiap bulannya kami mengambil gaji dari kas hanya Rp.90.000,00. kalo ada pergantian kepengurusan malah kami senang sekali”. (Wawancara 29 Nopember 2007).

#### b) Sarana Prasarana

Pada pelaksanaan kegiatan apapun, pastilah memerlukan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan kegiatan, demikian juga pada pelaksanaan program Gerdu-Taskin, pada kegiatan Tridaya para pengurus membutuhkan alat kelengkapan seperti komputer, kantor/ruangan untuk bekerja. Pelaksanaan Gerdu-Taskin yang ada di Desa Plandirejo, berbeda dengan UPK-UPK yang lain, hasil dari pengamatan peneliti, ternyata para pengurus UPK menggunakan alat kelengkapan untuk menjalankan kegiatan seperti, komputer yang digunakan untuk bekerja merupakan barang milik pribadi dan tempat untuk bekerja ternyata di rumah masing-masing pengurus. Hal ini dikarenakan UPK Plandirejo belum memiliki kantor sendiri yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Gazzali:

” Kami mengerjakan ini dirumah mbak, alat-alat yang kami gunakan ini adalah milik pribadi seperti komputer maupun printer, akan tetapi alat yang lain seperti kertas dan tinta uangnya kami ambil dari kas. Seharusnya Desa juga menyediakan kantor sebagai tempat untuk kami bekerja, akan tetapi sampai pada saat ini kami masih mengerjakan ini di rumah dan belum disediakan kantor”. (wawancara tanggal 09 Januari 2008).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Siswandi selaku Bendahara UPK Plandirejo, sebagai berikut:

“ memang benar mbak komputer merupakan salah satu alat kantor yang vital dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan Gerdu-Taskin ini, kami masih menggunakan komputer sendiri,

komputer saya ini biasanya sebagai alat bantu bekerja dalam usaha saya yaitu photo digital, ya kalo photonya gak rame , maka komputernya saya gunakan untuk mengerjakan kas harian gerdu-Taskin ini”. (Wawancara 29 Nopember 2007).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Suyitno selaku kepala Desa plandirejo, sebagai berikut:

“ sebenarnya disebelah ruangan Sekdes ini akan saya buat ruangan untuk para pengurus UPK mbak, tapi kami belum tahu waktunya. Sudah sejak lama kami membicarakan ini pada waktu musyawarah, tapi nanti akan saya usahakan untuk membentuk kan kesekretariatan pengurus UPK di Kantor Desa”. (Wawancara 29 Nopember 2007).

## 2) Kendala dari Peminjam

### a) Penunggakan dalam pengembalian pinjaman

Apabila dilihat dari segi kemungkinan penunggakan, berdasarkan pengamatan dalam penelitian selama ini, diketahui bahwa belum ada sanksi yang terlalu keras bagi peminjam yang melakukan penunggakan. Hal ini menyebabkan sebagian besar peminjam enggan untuk mengangsur. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Siswandi:

“ Mengenai masalah penunggakan, kami tidak pernah mendatangi rumah mereka untuk meminta mengembalikannya, akan tetapi ketika ada musyawarah di Desa, kami mencoba bicara kepada para peminjam yang menunggak tersebut mbak”. (wawancara tanggal 29 Nopember 2007).

Di lihat dari daftar angsuran dan tunggakan pinjaman juga menunjukkan bahwa dari seluruh peminjam, sebagian besar mengalami kemacetan dalam mengangsur, hal ini terlihat seperti pada tabel berikut:



Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai pada bulan Mei 2007 terjadi penunggakan sebesar Rp. 70.837.000,00 terdiri dari jumlah tunggakan pokok sebesar Rp. 61.415.000,00 dan jumlah tunggakan bunga sebesar Rp.9.422.000,00 pada umumnya kemacetan angsuran tersebut terjadi pada Pokmas yang sudah melakukan angsuran sebanyak 3-5 kali. Bahkan ada beberapa Pokmas yang sama sekali belum pernah mengangsur seperti yang tertera pada tabel di atas.

#### **b) Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam setiap program apapun sangat diperlukan, demikian juga dalam program Gerdu-Taskin khususnya pada pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam. Dalam usaha sektor simpan pinjam, warga Desa Plandirejo yang meminjam merupakan warga yang bukan tergolong RTMB, karena warga yang benar-benar diharapkan agar mau meminjam tersebut enggan untuk meminjam dikarenakan takut tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut. Kenyataan tersebut di ketahui dari hasil Kroscek yang dilakukan peneliti dengan klasifikasi data statistik.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Hartini selaku ketua Pokmas Ngadirejo II sebagai berikut:

”Dulunya kami tahu informasi tentang Gerdu-Taskin ini setelah dikumpulkan di desa untuk musyawarah mbak. Terus kami disuruh membentuk kelompok dengan anggota sepuluh orang setelah itu kami mengajukan permintaan pinjaman mbak. Anggota-anggota dalam kelompok kami ini biasanya sudah memiliki usaha mbak, ada yang pengrajin kayu, ada juga penjual kelapa dan mracang sayuran mbak, kalo kelompok lain saya kurang tahu”. (Wawancara 20 Desember 2007).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Gazzali selaku Ketua UPK Plandirejo sebagai berikut:

”begini mbak, kalo ditanya mengenai partisipasi masyarakat, memang masyarakat di desa sini sangat acuh khususnya masyarakat miskin yang seharusnya menjadi kelompok sasaran. Kurangnya partisipasi tersebut selain faktor dari desa juga karena dari mereka sendiri, masyarakat desa kami sulit untuk ditumbuhkan motivasinya untuk menjalankan usaha, selain itu kurangnya informasi mengenai

program juga mengakibatkan kurangnya partisipasi karena informasi tidak menjangkau dari lapisan bawah”. (Wawancara 02 Maret 2008)

### 3) Kendala dari Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan Tridaya, sangat diharapkan juga dukungan dari perangkat Desa khususnya dari kepala Desa dan anggota BPD untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha UPK. Dalam pelaksanaan Gerdu-Taskin di Desa Plandirejo ini menunjukkan hal yang sangat berbeda. Berdasarkan buku kas harian UPK Gerdu-Taskin Plandirejo, diketahui bahwa kepala Desa Plandirejo melakukan pinjaman sebesar Rp. 8000.000,00 dengan nama Pokmas Sidorejo II pada tanggal 29 Juli 2004 dan sampai pada saat ini belum melakukan angsuran pinjaman sama sekali. Hal serupa dilakukan juga oleh ketua BPD yang melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,00 dengan nama Pokmas Wonorejo II pada tanggal 29 Juli 2004. Selain kendala yang disebutkan di atas, UPK juga mengalami intervensi dari kepala Desa. Hal tersebut seperti yang disampaikan Bapak Gazzali:

” ...masalah yang berarti sekali bagi kami selaku pengurus UPK adalah dari kepala Desa itu sendiri mbak, kalau menurut aturan dari buku pedoman, perangkat Desa tidak boleh meminjam, tapi gimana lagi mbak, setiap hari kami selalu di musuhi di depan umum, pencairan pinjaman inipun kami berikan setelah kami berdebat di Bappeda. Sebenarnya, sejak awal diadakannya program ini, kami sangat semangat sekali, karena kami percaya masyarakat bisa diajak belajar bersama-sama dan harapan kami sebelumnya, bahwa masyarakat di Desa ini bisa lebih sejahtera dengan adanya bantuan ini, akan tetapi setelah adanya sikap dari kepala Desa tersebut, maka kami memutuskan untuk diam, karena warga di Desa juga acuh atas sikap dari kepala Desa, jadinya ya seperti yang mbak lihat saat ini. Kalau begini, lebih baik kami konsentrasi ama pekerjaan kami sehari-hari mencari nafkah untuk anak-istri, jadi urusan Gerdu-Taskin kami tangani setelah kami pulang kerja”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Binti Sulikah selaku anggota dari Pokmas Sidorejo III dan juga sebagai pengurus koperasi dan PKK desa Plandirejo sebagai berikut:

” Dulu ya mbak waktu ada bantuan untuk PKK dan koperasi juga gitu, Bapak Kepala Desa juga ikut meminjam dan akhirnya juga terjadi kemacetan angsuran, sehingga untuk bantuan-bantuan selanjutnya juga ikut macet” (Wawancara 20 Desember 2007).

#### D. Pembahasan

##### 1. Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

###### 1) Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan, Musyawarah Desa (Perencanaan) dan Sosialisasi.

Sebagaimana konsekuensi logis diterapkannya Otonomi Daerah (OTDA), maka program pembangunan daerah khususnya pada pengentasan kemiskinan harus dapat dilaksanakan secara terinci dan terukur. Salah satunya program Gerdu-Taskin yang diharapkan dapat mengoptimalkan semua elemen yang berhubungan dengan program Gerdu-Taskin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penyajian data di atas, diketahui bahwa pada tahap persiapan dilakukan sosialisasi program kepada masyarakat, dimana masyarakat diundang untuk hadir di Balai Desa setempat. Hadir dalam kegiatan sosialisasi antara lain: 48 orang perwakilan RTM yang ditunjuk, wakil tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan, wakil kelompok/organisasi perempuan, wakil pemerintah Desa, BPD, LPMD. Musyawarah tersebut menjelaskan mengenai Gerdu-Taskin, maksud dan tujuannya serta memilih kepengurusan UPK.

Urutan pelaksanaan dari pada program Gerdu-Taskin antara lain: Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan maupun Musyawarah Desa perencanaan serta Sosialisasi, Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai urutan pelaksanaan program tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dimulai dari adanya informasi tentang program Gerdu-Taskin ini, tidak ada tanggapan menyeluruh dari masyarakat di desa tersebut khususnya RTM yang menjadi kelompok sasaran, hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai adanya program Gerdu-Taskin. Kurangnya informasi tersebut karena keterbatasan waktu dan biaya untuk bersosialisasi kepada masyarakat, selain itu juga ada pengaruh yang dominan dari Kepala Desa untuk menentukan

siapa saja yang diundang untuk hadir dalam Musyawarah Desa. Kemudian mengenai pemilihan kepengurusan UPK, Kepala Desa menunjuk langsung siapa yang menjadi pengurus UPK. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, seharusnya aturannya ialah bahwa TPM memfasilitasi adanya pertemuan para pemuka masyarakat untuk membentuk dan memilih kepengurusan UPK, dimana pembentukan UPK ini diawali dari pembentukan Pokmas. Setelah Pokmas terbentuk, mereka memilih personal yang dicalonkan sebagai pengurus UPK. Pemilihan pengurus UPK seharusnya dilakukan secara demokratis di Balai Desa setempat yang dihadiri antara lain oleh Kepala Desa, Pemuka masyarakat, dan masyarakat umum.

Dengan adanya pengaruh yang dominan tersebut berarti di Desa Plandirejo masih terbawa oleh pengaruh orde lama yaitu keputusan penuh ada pada Kepala Desa, sehingga masyarakat desa tersebut kurang tahu mengenai informasi tentang Gerdu-Taskin. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kswadayaan maupun partisipasi bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan seharusnya seoptimal mungkin dilaksanakan dengan memeransertakan semua pelaku program terutama kelompok miskin. Dalam hal ini, hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh kepala desa yang berhak mengurus program tersebut. Oleh karena itu maka masyarakat tidak memiliki ruang gerak yang seluas-luasnya untuk menuangkan berbagai inisiatif dan kreatifitas bagi sebagian masyarakat yang tergolong mampu untuk melaksanakan program Gerdu-Taskin.

Jadi, dari fakta yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di desa Plandirejo khususnya kepala Desa masih menggunakan pendekatan yang *top-down* dan sentralistik dalam pengambilan keputusan.

Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena

masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Menurut *Cornell Empowerment Group* dalam Mulyadi (2005:1) syarat berlangsungnya proses pemberdayaan yaitu:

- 1) Anggota masyarakat memiliki "rasa kemasyarakatan (*sense of community*/guyub/kebersamaan) dan mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan,
- 2) Partisipasi warga, yaitu suatu proses di mana tiap individu ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga, program dan lingkungan di mana mereka berada.

Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, yaitu model 'Pemberdayaan Masyarakat'. Dasar proses Pemberdayaan Masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

## 2) Pelaksanaan Kegiatan Tridaya & Pencairan Dana

Selanjutnya, setelah terbentuknya Pokmas, UPK dan kepengurusannya, maka dilaksanakan program Tridaya, yaitu Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan Usaha. Pelaksanaan Pemberdayaan Manusia di mulai dengan dilaksanakannya plesterisasi, pemberian bantuan bea siswa kepada 30 anak dari 30 KK RTMR dan pemberian santunan kesehatan kepada 30 KK RTMR melalui hibah sebesar Rp. 29.100.000,00 yang mulai dicairkan kepada Timlak pada tanggal 29 Juli 2004. Selanjutnya

yaitu pelaksanaan Pemberdayaan manusia yaitu pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana fisik antara lain: Plengsengan jalan di semua dusun, jembatan Plengseng untuk Dusun Wonorejo, dan pengerasan jalan makadam untuk Dusun Ngadirejo dan Dusun sidorejo. Dana untuk Pemberdayaan Lingkungan tersebut sebesar Rp. 50.515.000,00 yang di cairkan pada Timlak mulai tanggal 10 Desember 2004.

Dana untuk kegiatan Pemberdayaan Usasa sektor simpan pinjam sebesar Rp. 63.000.000,00 yang diambil dari bank pada tanggal 28 Juli 2004 yang langsung dicairkan kepada 9 Pokmas (80 orang). Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan simpan pinjam benar-benar terlaksana terhitung pada tanggal 29 Juli 2004 setelah pengambilan dana dari Bank. Hal tersebut dikarenakan pada bulan-bulan awal program ini di gunakan untuk sosialisasi dan musyawarah.

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha di Desa Plandirejo hanya memilih pada usaha sektor simpan pinjam saja, hal tersebut dibenarkan oleh ketua UPK maupun beberapa Pokmas. Dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Plandirejo belum mampu untuk melaksanakan program pemberdayaan usaha dalam sektor riil, karena pada kenyataannya secara keseluruhan masyarakat Desa Plandirejo belum bisa memanfaatkan potensi sumberdaya lahan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari keadaan sosial ekonomi dan pendidikan yang sangat rendah. Tingkat pendidikan penduduk masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pendidikan orang tuanya, motivasi bersekolah dari anak-anak, serta adanya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang berada di Desa Plandirejo yang sangat terbatas.

Tatacara peminjaman pada sektor simpan pinjam pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu meliputi: Pokmas UEP mengajukan permohonan pinjaman modal secara individu kepada

RT/RW. Peminjam juga harus mendapatkan rekomendasi dari RT/RW setempat. Apabila sudah mendapatkan rekomendasi tersebut diteruskan kepada UPK untuk diproses, adapun proses yang dilakukan UPK Plandirejo meliputi klarifikasi riwayat hidup peminjam, permohonan pinjaman dilampiri dengan rencana angsuran Pokmas UEP yaitu bunga yang harus ditanggung oleh peminjam adalah sebesar 2% dengan lama angsuran 10 kali, kemudian dianalisis kelayakan usahanya oleh UPK. Setelah usulan kegiatan UEP ini disetujui, sebelum pencairan dana kepada masing-masing Pokmas UEP dilaksanakan penandatanganan akad pinjaman antara Pokmas UEP dengan UPK sekaligus juga menyerahkan jaminan/agunan atas pinjaman tersebut. Akan tetapi perbedaannya dengan UPK yang lain yaitu pada kenyataannya peminjam bukan orang yang termasuk dalam kriteria RTMB, akan tetapi peminjam berlaku bagi siapa saja yang ingin membutuhkan dana pinjaman tersebut. UPK Plandirejo memutuskan untuk memberlakukan pinjaman bagi siapa saja dengan pertimbangan bahwa dana untuk usaha sektor simpan pinjam telah cair dan kenyataannya RTMB tidak berani meminjam, akhirnya pinjaman tersebut berlaku bagi siapa saja yang membutuhkan pinjaman dengan tidak mengabaikan prosedur yang ada.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi .

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program belum mampu menjangkau warga miskin karena yang meminjam dana pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam adalah warga yang tergolong mampu. Sedangkan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

### 3) Hasil

Secara umum, pelaksanaan Gerdu-Taskin diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat, melalui pendekatan Tridaya (Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan Usaha) dengan fokus utama penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Muchtar bahwa dalam suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

Selain itu, Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kandungan kapital baik yang tersedia dalam masyarakat maupun yang bersumber dari kapital eksternal. Mengacu pada UU No. 32/2004 pemberdayaan berarti pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan. Dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar peningkatan partisipasi juga dalam kepemilikan.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan pada penyajian data di atas maka hasil yang dicapai dalam program Gerdu-Taskin antara lain:

#### a) **Pendapatan UPK**

Selama 2 tahun program Gerdu-Taskin ini berjalan, menunjukkan adanya pertambahan pendapatan dari dana program pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam sebesar Rp. 28.308.900,00 jadi jika dijumlahkan dengan modal UPK sebesar Rp. 73.000.000, maka menjadi Rp. 101.308.900. (Laporan neraca UPK Plandirejo Per 31 Desember 2006). Hal ini menunjukkan bahwa UPK Plandirejo telah mampu memberikan pencairan dana sebesar Rp.79.125.000,00.

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu-satunya pendapatan UPK berasal dari hasil pelaksanaan usaha simpan pinjam, karena dana untuk pemberdayaan Lingkungan maupun Pemberdayaan Manusia, telah habis ketika proyek berakhir.

#### **b) Pengembangan Usaha dan Pendapatan Kelompok Sasaran**

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi .

Peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan program bagi penduduk miskin. Konsep yang digunakan adalah untuk mengukur pendapatan rumah tangga peserta program setelah mengikuti program dengan pendapatan sebelum program. Setelah berjalannya program usaha simpan pinjam, maka diharapkan hasil dari usaha tersebut adalah meningkatnya pendapatan serta terjadi pengembangan usaha. Namun, fakta menunjukkan tidak terjadi adanya pengembangan usaha bagi para peminjam.

Kebanyakan Pokmas yang melakukan pinjaman merupakan ibu rumah tangga dan kadang-kadang membantu suaminya bekerja sebagai petani buruh di sawah, jadi ibu-ibu tersebut tidak memiliki usaha yang produktif. Dengan kata lain, sebagian besar para peminjam menggunakan dana tersebut untuk konsumsi sehari-hari bukan untuk penambahan modal usaha. Konsumsi sehari-hari itu seperti untuk keperluan sekolah anaknya maupun untuk kebutuhan akan makanan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, adanya pinjaman yang digunakan untuk kegiatan non produktif merupakan salah satu

penyebab tidak terjadinya pengembangan usaha. Akan tetapi, pemanfaat dana pinjam yang tidak sepenuhnya untuk kegiatan produktif tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari peminjam karena memang kebutuhan non produktif banyak yang harus segera dipenuhi. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar social relative tidak berlangsung, karena program lebih bernuansa economic dengan fakta adanya penambahan pendapatan dari UPK tersebut, dan tidak terjadi transfer daya pada masyarakat miskin karena belum bisa meningkatkan kandungan kapital dari dana pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam yang telah dipinjam tersebut.

#### 4) **Pertanggungjawaban Dan Pelestarian**

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dan pelestarian pada kegiatan Gerdu-taskin Desa Plandirejo tidak dilakukan secara maksimal karena pengelola Gerdu-Taskin tidak melakukan laporan secara berkala kepada Sektap Kabupaten, sehingga perkembangan Gerdu-Taskin hanya diketahui oleh pengelola yang ada di desa saja, hal tersebut akan mengakibatkan pendampingan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan pelestarian dari hasil kegiatan hanya sebatas teguran bagi Pokmas yang terdapat kemacetan angsuran saja, ini berarti tidak ada sanksi yang tegas bagi Pokmas yang menunggak dan masih mengandalkan prinsip kepercayaan.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan pengertian yang disebutkan oleh Muchtar (2003:1) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas mengenai pelaksanaan Gerdu-Taskin, maka dapat dilakukan analisis berdasarkan tujuan program, kerangka pikir, dan hasil yang dicapai:

*Pertama*, Tujuan program. Pemberdayaan usaha sektor simpan pinjam bagi masyarakat dikembangkan melalui Pokmas (Kelompok Masyarakat), dan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) dilakukan koordinasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

*Kedua*, kerangka pikir, bahwa:

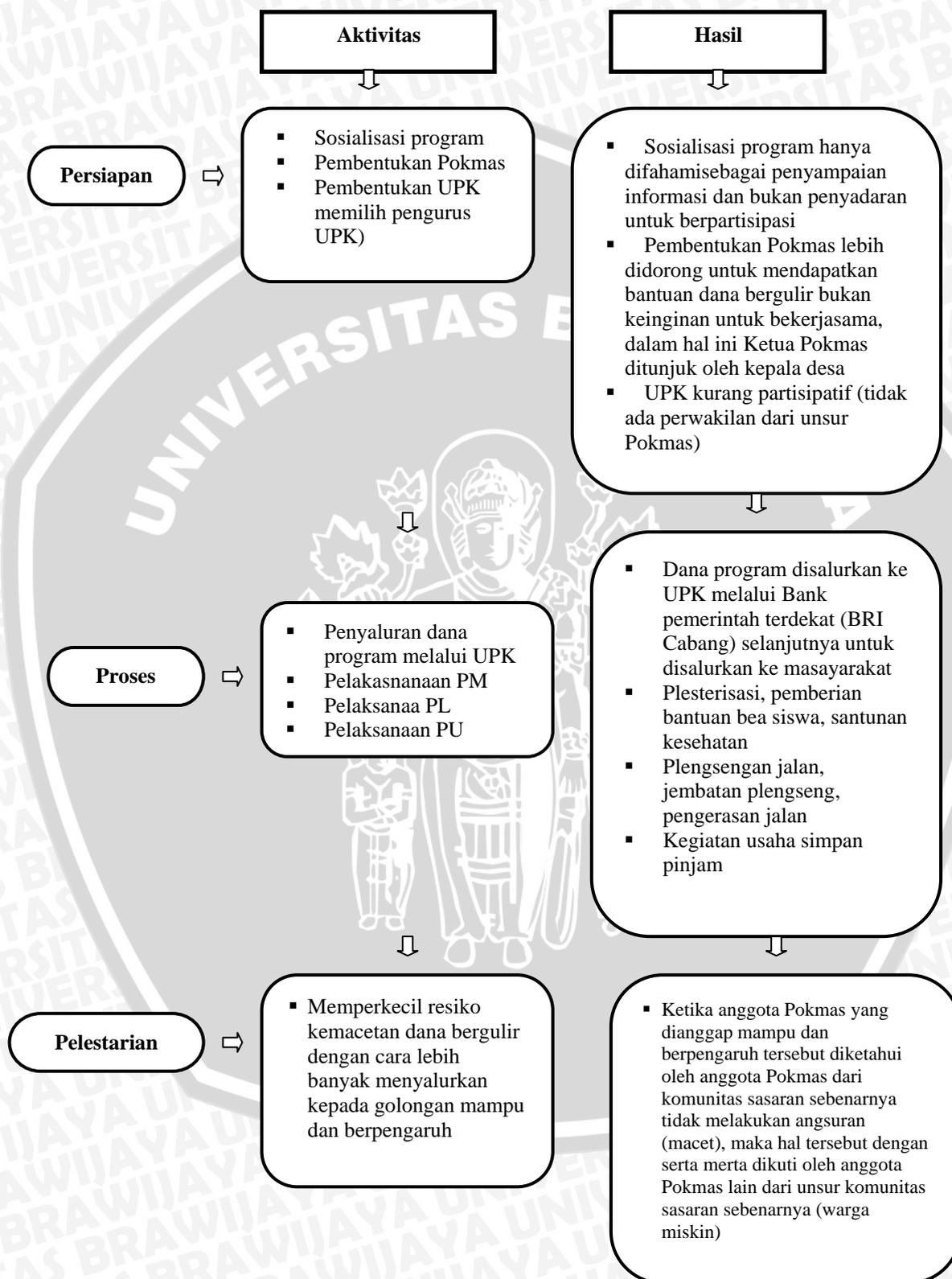
- a) Sasaran pemberdayaan adalah Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) dan Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R);
- b) Adanya transfer daya, sehingga *benefecieries* mampu menentukan pilihan hidupnya;
- c) Adanya proses belajar sosial menuju penyadaran tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkan masalah tersebut; dan
- d) Adanya kelembagaan yang mampu menampung dan menyuarakan kepentingan kelompok masyarakat (Pokmas).

*Ketiga*, hasil yang dicapai, yaitu:

- a) Implementasi program belum mampu menjangkau warga miskin yang semakin tidak berdaya
- b) Tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, karena program lebih dimanfaatkan oleh golongan masyarakat yang lebih mampu dan berpengaruh, dan adanya dominasi oleh elit desa.
- c) Relatif tidak terjadi proses belajar sosial, karena kegiatan program lebih bernuansa *economic*, dan UPK lebih berperan sebagai penyalur kredit dari pada sebagai upaya pemberdayaan.

Secara singkat, proses pelaksanaan program dikemukakan berikut:

**Gambar 5**  
**Proses pelaksanaan program**

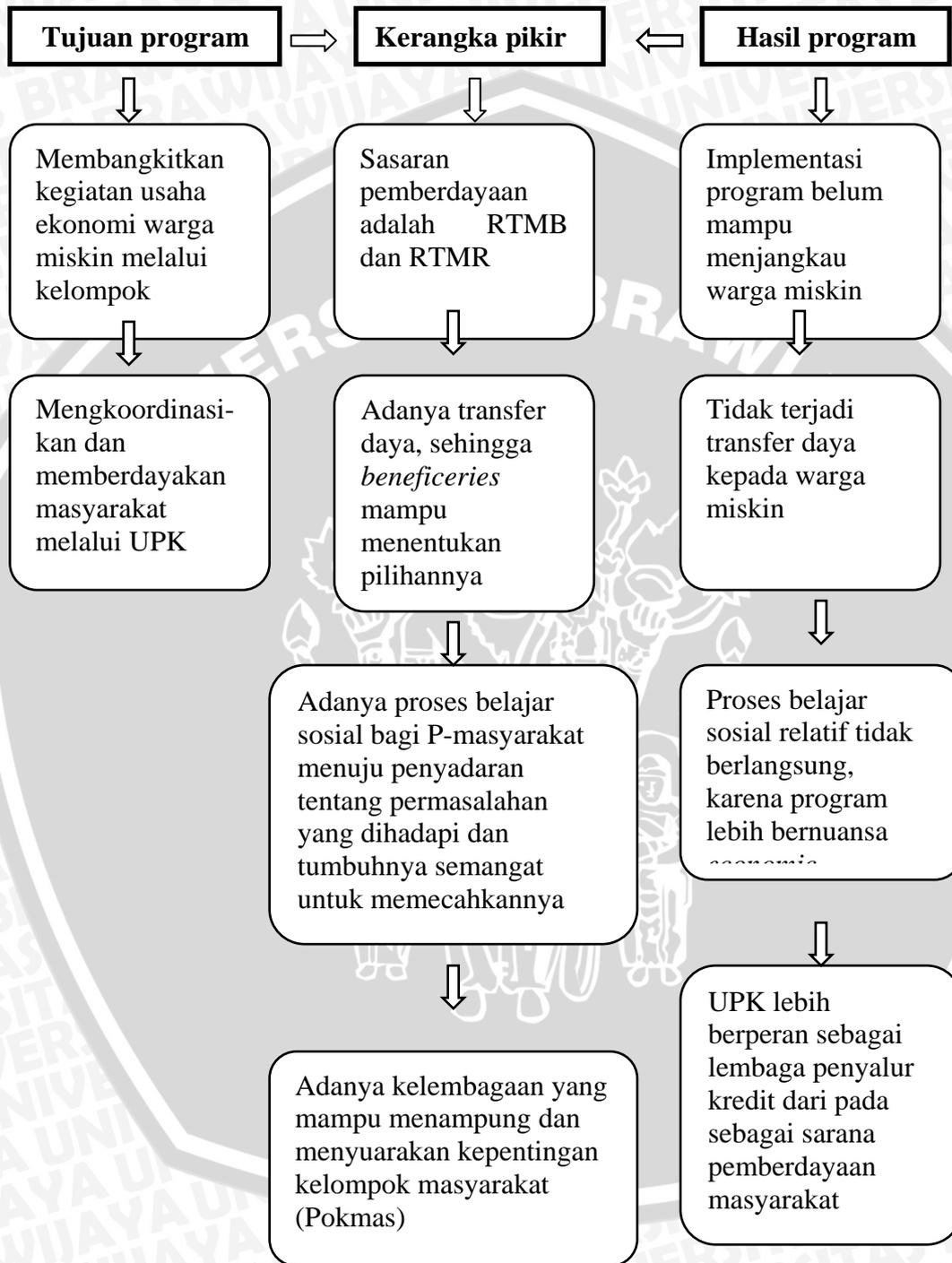


Sumber: Simpulan hasil wawancara dengan informan, 2007

Secara sederhana hasil program tersebut dideskripsikan berikut:

Gambar 6

Hasil yang dicapai oleh program



Sumber: Simpulan hasil wawancara dengan informan, 2007

## 2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dari Pelaksanaan Gerakan Terpadu pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

### 1) Kendala dari UPK

UPK merupakan pengelola Gerdu-Taskin yang diharapkan akan menjadi lembaga keuangan mikro yang akan dapat memberdayakan masyarakatnya. Optimalisasi kinerja dari para pengurus UPK sangat diperlukan guna terlaksananya program Gerdu-Taskin sesuai dengan tujuannya. Pengurus UPK Plandirejo pada awalnya terdiri dari 3 orang yaitu: Bapak Gazzali (Ketua), Bapak Siswandi (Bendahara), dan Bapak Sutrisno (Sekretaris). Akan tetapi setelah 1 tahun berjalannya program, Bapak Sutrisno selaku Sekretaris UPK mengundurkan diri. Akhirnya tugas dari Sekretaris dirangkap oleh bapak Siswandi selaku Bendahara. Dengan adanya kenyataan seperti itu, maka volume pekerjaan daripada bendahara tersebut akan semakin bertambah

Selain dengan adanya rangkap jabatan tersebut, ternyata pengurus UPK Plandirejo tidak dapat mencurahkan sepenuhnya kesempatan dan perhatiannya pada tugas-tugasnya. Sehingga mengakibatkan kurangnya waktu, tenaga, dan pikiran mereka bagi kemajuan UPK Hal ini dikarenakan gaji yang diterima UPK setiap bulannya sangat minim sekali yaitu hanya Rp. 90.000,00 per bulan. Oleh karena itu, para pengurus UPK lebih sibuk pada pekerjaan yang dijalannya setiap hari untuk memenuhi nafkah keluarganya. Padahal pada dasarnya UPK diharapkan dapat menjadi Lembaga Ekonomi Desa dengan fokus pelayanan keuangan dan pengembangan usaha (*micro finance*) dan mengembangkan sistem keterjaminan sosial (*social insurance*).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Gerdu-Taskin berjalan seadanya, tetapi harus disadari juga bahwa kelangsungan program yang dijalankan oleh UPK harus diikuti dengan dukungan dari masyarakat maupun Pemerintah Desa setempat, karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pengurus UPK pada dasarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam rangka pelaksanaan Tridaya, dibutuhkan kinerja yang optimal dari UPK, dan untuk menunjang kinerja tersebut diantaranya membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu pekerjaan UPK untuk mencapai kinerja yang maksimal. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan dalam penyajian data di atas, diketahui bahwa sarana dan prasarana seperti komputer, meja, dan tempat kerja belum disediakan oleh Pemerintah Desa dan pengurus UPK masih menggunakan barang milik pribadi serta rumah untuk menjalankan tugasnya sebagai pengurus Gerdu-Taskin.

Kenyataan tersebut akan menjadi faktor penghambat bagi UPK dalam melaksanakan tugasnya, karena alat yang digunakan untuk bekerja pengurus UPK adalah barang pribadi yang sekaligus juga digunakan untuk membantu pekerjaannya sendiri di luar urusan Gerdu-Taskin. Oleh sebab itu, pengurus lebih mendahulukan pekerjaannya dengan menggunakan komputer tersebut, lalu kemudian menyelesaikan urusan Gerdu-Taskin setelah pekerjaannya selesai atau jika ada waktu.

## 2) **Kendala dari Peminjam**

Dalam penyajian data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa tingkat kemacetan angsuran tersebut sangat tinggi hingga mencapai kurang lebih 80%. Terkait dengan tingginya tingkat kemacetan pengembalian angsuran Pokmas tersebut adalah merupakan akibat dari akumulasi sejumlah permasalahan, antara lain: kesibukan masing-masing pengurus UPK yang mengakibatkan kurangnya waktu, tenaga, dan pikiran mereka bagi kemajuan UPK, kurangnya dukungan pemuka masyarakat yang tidak duduk dalam kepengurusan UPK, masih lemahnya pemahaman pengurus UPK tentang fungsi dan peran mereka sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat, penyaluran dana melalui Gerdu-Taskin ini kurang tepat sasaran karena yang menerima dana tersebut bukan dari RTMB, serta tidak ada sanksi secara tegas dalam Gerdu-Taskin terhadap Pokmas yang melanggar ketentuan Gerdu-Taskin sesuai dari hasil wawancara yang

telah disebutkan dalam penyajian data di atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak diterapkannya sanksi bagi peminjam yang melakukan penunggakan juga bisa menjadi salah satu indikasi penyebab penunggakan. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa program Gerdu-Taskin tersebut dapat dinyatakan gagal.

Landasan gerak operasional Program Gerdu-Taskin salah satunya adalah berlandaskan atas prinsip partisipasi, yaitu bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan mulai dari sosialisasi, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian, seoptimal mungkin dilaksanakan dengan memeransertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tridaya pada desa Plandirejo ini, masyarakat dapat dikatakan sangat pasif, hal tersebut dapat terjadi karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pada saat mulai dilaksanakan program Gerdu-taskin ini, hanya sebagian masyarakat yang dikumpulkan untuk sosialisasi dan musyawarah, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi program belum terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang dimaksud dengan program Gerdu-Taskin itu sendiri.

### **3) Kendala dari Pemerintah Desa**

Kendala dari pemerintah desa terjadi pada beberapa perangkat desa yaitu kepala desa dan anggota BPD. Dalam program Gerdu-Taskin ini, keterlibatan kepala desa sangat dominan, mulai dari musyawarah pra pelaksanaan sampai pada pencairan dana. Dari penyajian data yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa Kepala Desa dan anggota BPD telah ikut meminjam dana yang dapat dijumlahkan menjadi sebesar Rp.13.000.000,00 dengan jumlah bunga sebesar Rp.2.600.000,00 sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 15.600.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 10-06-2005 dan tanggal 01-12-2005. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka hal yang sama diikuti oleh Pokmas-Pokmas yang lain, sehingga terjadi kemacetan angsuran yang mencapai kurang lebih 80%.

Paradigma penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah saat ini adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila “kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan”. Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan menurut Mubyarto (2002:1) dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. “Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya”.

Secara umum, pelaksanaan Gerdu-Taskin secara keseluruhan berjalan seadanya dan ada kesan dipaksakan, karena mengejar target khususnya target waktu dan pelatihan bagi pengurus UPK tidak dilakukan sejak dini (sebelum operasionalisasi kegiatan UPK), yang terjadi adalah pelatihan bagi pengurus UPK dilakukan setelah operasionalisasi kegiatan UPK, akibatnya, tidak berjalannya Gerdu-Taskin sebagaimana diharapkan.

Pada dasarnya Program Gerdu-Taskin ini didasarkan pada keinginan untuk memberdayakan penduduk miskin. Proses pemberdayaan (*empowerment*) dapat dilakukan jika penduduk miskin dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan problem yang mereka hadapi. Proses pemberdayaan ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Pemberdayaan itu sendiri adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Mughtar, 2003: 3). Jadi, biarkanlah penduduk miskin itu berpikir untuk mencari sendiri jalan keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana masyarakat menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, dalam Program Gerdu-

Taskin ini, Partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas pada orang-orang tertentu sehingga pelaksanaan program tidak dapat memberdayakan masyarakat. Hal ini terbukti dari tidak adanya kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk merencanakan dan melaksanakan program Gerdu-Taskin yang berarti bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat berperan serta.

Dengan tidak adanya partisipasi dalam sosialisasi maupun musyawarah mengenai program Gerdu-Taskin ini maka akan terjadi keterbatasan informasi tentang Gerdu-Taskin itu sendiri, kurangnya pembinaan Sumberdaya manusia, dan kurangnya kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan Tridaya.

Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, akan tetapi dengan tidak adanya kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat yang menjadi kelompok sasaran akan tetap menjadi tidak berdaya. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha bagi kelompok yang mendapatkan dana usaha simpan pinjam. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan pada tahap awal dimulainya program ini dengan tidak melibatkan masyarakat miskin itu sendiri, selain itu juga kurangnya sosialisasi program serta perlunya pembinaan sumberdaya manusia. Padahal Program Gerdu-Taskin untuk memberdayakan masyarakat miskin seharusnya menjadi suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok, yang mana melalui proses ini mereka yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam program Gerdu-Tsakin sangat diperlukan, karena masyarakat kelompok sasaran memegang dana

yang nantinya digunakan untuk meningkatkan mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini perlu adanya pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, dimana sosialisasi bukan semata penyebaran informasi, tetapi lebih dari itu, yaitu menuju penyadaran tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkannya secara mandiri, untuk itu diperlukan pelaku program yang mempunyai kualitas memadai.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan optimalnya pelaksanaan Program Gerdu-Taskin ini, juga butuh keterpaduan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Seharusnya pada saat mulai diadakannya program, pada tataran sosialisasi program, masyarakat yang menjadi kelompok sasaran harus benar-benar mengerti tentang penjelasan mengenai program Gerdu-Taskin, masyarakat yang menjadi kelompok sasaran juga harus benar-benar masyarakat yang terdaftar dalam PKIB BPS serta termasuk dalam RTMB dan RTMR. Mengenai sosialisasi ini, masyarakat diberikan pendampingan dan pembinaan agar dana yang dipinjamkan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif sehingga tujuan program akan tercapai dan kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan, pada setiap tahapan program, baik formal maupun informal, dengan menggunakan berbagai media yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat memahami program Gerdu-Taskin, memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program, baik sebagai pengelola maupun pemanfaat, memiliki komitmen untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program, serta bersedia memanfaatkan, melestarikan dan mengembangkan program. TPM dan UPK juga harus melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada RTM sasaran program.

Selain pada tataran sosialisasi, pada saat penjarangan calon pengurus UPK, maka pengurus UPK dipilih oleh melalui musyawarah desa. Agar UPK dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka dipilih pengurus yang mempunyai kemampuan yang memadai sesuai dengan kriteria yang ada.

Menurut pedoman umum Gerdu-Taskin 2004, Pada tataran pelaksanaa, dana pemberdayaan harus dialokasikan untuk kelompok RTMB atau RTMR sesuai dengan ketentuan Tridaya, maka dalam hal ini setelah dana cair maka pengelolaan dana ditangani oleh pengurus UPK yaitu Ketua, bendahara dan sekretaris, maka pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan ketua BPD hanya sebagai unsur pengawas saja dan bertanggungjawab menyediakan sarana prasarana UPK berupa ruang sekretariat dan inventaris serta mendukung pengembangan kegiatan usaha UPK. Dengan demikian, peran dominan dari BPD dan Kepala Desa dalam Gerdu-Taskin desa Plandirejo tidak sesuai dengan aturan yang telah disutkan diatas. Sehingga yang dapat dilakukan pemerintah Desa dan BPD adalah hanya memberikan pendampingan. Model penyelesaian partisipatif tentu lebih baik. Selain itu, program Gerdu-Taskin harus bebas dan bersih dari kepentingan politik siapapun.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan pada Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kabupaten Blitar.

a) Klarifikasi RTM, Klasifikasi RTM, Identifikasi Kebutuhan, Musyawarah Desa (Perencanaan) dan Sosialisai. Klarifikasi dan Klasifikasi RTM sudah sesuai dengan PKIB BPS tahun 2001, akan tetapi yang tergolong dalam klasifikasi RTM tersebut hanya sedikit yang menjadi pemanfaatan program, sehingga dapat dikatakan bahwa program kurang tepat sasaran. Sosialisasi pada program Gerdu-taskin desa Plandirejo sangat kurang sekali, karena hanya dilakukan dalam beberapa hari sebelum program benar-benar dilaksanakan sehingga masyarakat kurang memahami mengenai program Gerdu-Taskin sehingga menyebabkan kurang adanya partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran.

b) Pelaksanaan Kegiatan Tridaya & Pencairan Dana

1) Anggaran biaya untuk kegiatan Pemberdayaan Manusia berjumlah Rp.29.100.000,- (*dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*) yang disalurkan dalam bentuk kegiatan yaitu: plesterisasi terhadap 80 KK RTMR, pemberian bantuan beasiswa kepada 30 anak dari 30 KK RTMR, dan pemberian santunan kesehatan kepada 30 KK RTMR.

2) Alokasi dana untuk Pemberdayaan Lingkungan berasal dari sumber dana APBD Propinsi sebesar Rp. Rp. 30.309.000,00 , dan dari APBD Kabupaten sebesar Rp Rp. 20.206.000,00, jadi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.515.000,00. Bentuk dari Pemberdayaan lingkungan adalah kegiatan Pengerasan jalan, pembangunan Jembatan plengseng, pembangunan WC dan KM umum dan pembangunan Plengsengan jalan Dusun.

3) Pemberdayaan Usaha untuk kegiatan usaha simpan pinjam mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 63.000.000,00 yang dicairkan pada tanggal 28 Juli 2004 melalui Bank (BRI Cabang) selanjutnya disalurkan ke masyarakat (Kelompok Sasaran).

c) Hasil

- 1) Tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, karena program lebih dimanfaatkan oleh warga yang lebih mampu;
- 2) Proses belajar sosial relatif tidak berlangsung, karena program lebih bernuansa *economic*; dan
- 3) UPK lebih berperan sebagai lembaga penyalur kredit dari pada sebagai lembaga pemberdayaan. Disamping itu, juga terlihat dari tingkat kemacetan angsuran di Pokmas yang mencapai  $\pm 80\%$ .

d) Pertanggungjawaban dan Pelestarian

- 1) Pertanggungjawaban dan pelestarian pada kegiatan Gerdu-Taskin Desa Plandirejo tidak dilakukan secara maksimal karena pengelola Gerdu-Taskin tidak melakukan laporan secara berkala kepada Sektap Kabupaten.
- 2) Pelestarian dari hasil kegiatan hanya sebatas teguran bagi Pokmas yang terdapat kemacetan angsuran saja, ini berarti tidak ada sanksi yang tegas bagi Pokmas yang menunggak dan masih mengandalkan prinsip kepercayaan.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dari pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Plandirejo, Kabupaten Blitar.

Secara umum, kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan Gerdu-Taskin yaitu:

a) Kendala dari UPK

- 1) Terjadinya rangkap tugas pada kepengurusan UPK;
- 2) Sarana dan prasarana berupa ruang sekretariat dan inventaris yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah Desa tidak disediakan sehingga menggunakan milik pribadi.

b) Kendala dari Peminjam

1) Adanya penunggakan dalam pengembalian pinjaman yang merupakan akibat dari akumulasi sejumlah permasalahan, antara lain: kesibukan masing-masing pengurus UPK yang mengakibatkan kurangnya waktu, tenaga, dan pikiran mereka bagi kemajuan UPK, masih lemahnya pemahaman pengurus UPK tentang fungsi dan peran mereka sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat, penyaluran dana melalui Gerdu-Taskin ini kurang tepat sasaran karena yang menerima dana tersebut bukan dari RTMB, serta tidak ada sanksi secara tegas dalam Gerdu-Taskin terhadap Pokmas yang melanggar ketentuan Gerdu-Taskin; adanya manipulasi data mengenai anggota Pokmas;

2) Kurangnya partisipasi masyarakat.

c) Kendala dari Pemerintah Desa

Pemerintah Desa belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dalam hal ini Pemerintah Desa belum bisa menyediakan sarana dan prasarana UPK berupa ruang kesekretariatan dan inventaris, tidak semua warga ikut sosialisasi karena warga yang ikut dipilih oleh Kepala Desa.

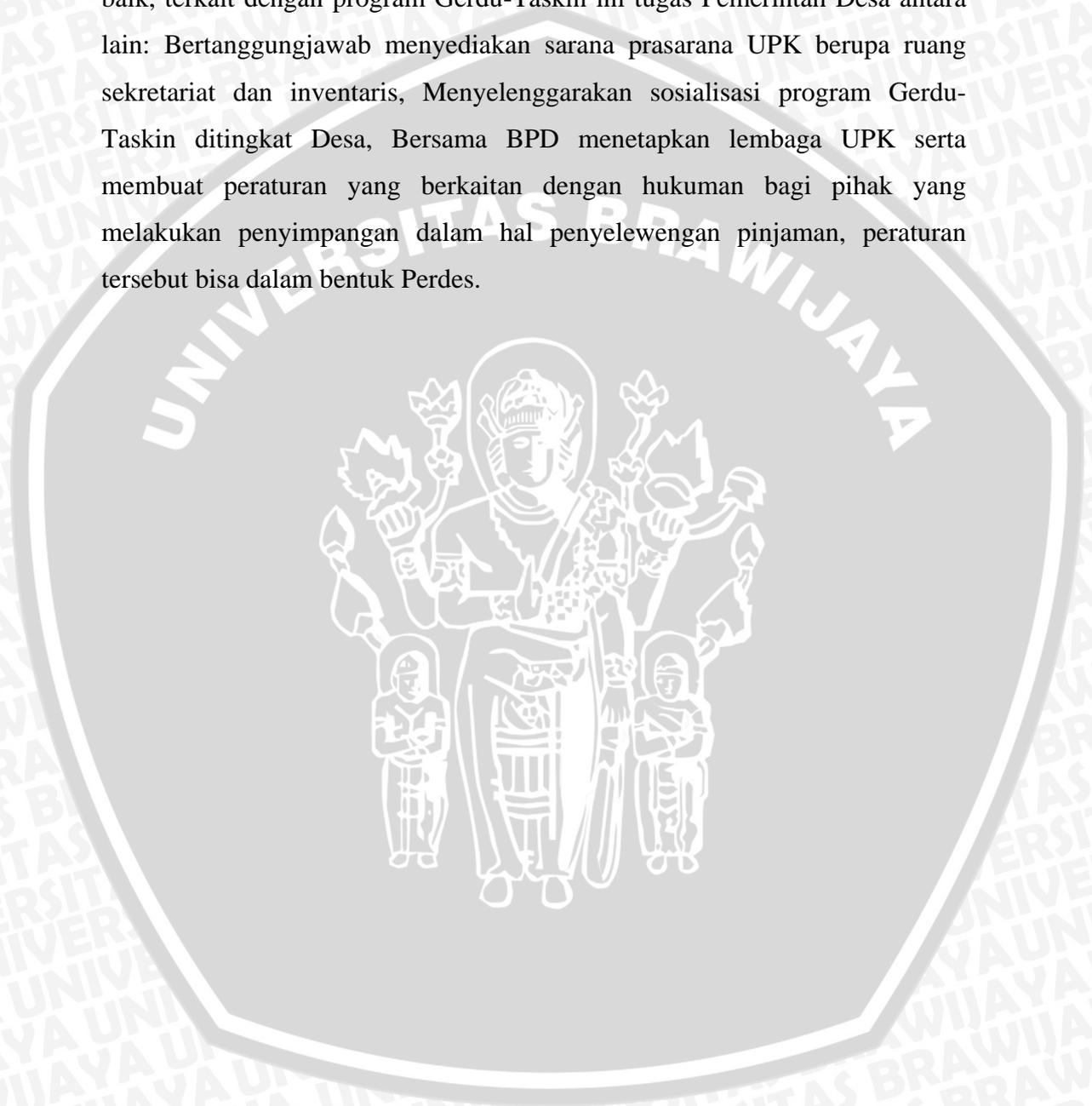
## B. Saran

Bertolak dari kesimpulan itu, saran yang diajukan yaitu:

1. Para pelaku Gerdu-Taskin (tahap berikutnya) perlu mempunyai pemahaman secara baik terhadap konsep Gerdu-Taskin. Untuk itu, kedepan, dalam perekrutan tenaga di lapangan harus dilakukan secara lebih cermat, karena perlu pengurus yang memiliki kualitas yang memadai agar para pengurus nantinya mampu menampung prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat.
2. Perlunya pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, dimana sosialisasi bukan semata penyebaran informasi, tetapi lebih dari itu, yaitu menuju kesadaran tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkannya secara mandiri, sehingga implementasi program dapat menjangkau kelompok sasaran. Selain itu juga disertai pelatihan-pelatihan sebelum program benar-benar dijalankan dengan

memberikan bekal pelatihan sesuai dengan keadaan potensi lokal yang ada di desa tersebut.

3. Perlunya pendampingan dan dukungan dari Pemerintah Desa setempat. Diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terkait dengan program Gerdu-Taskin ini tugas Pemerintah Desa antara lain: Bertanggungjawab menyediakan sarana prasarana UPK berupa ruang sekretariat dan inventaris, Menyelenggarakan sosialisasi program Gerdu-Taskin ditingkat Desa, Bersama BPD menetapkan lembaga UPK serta membuat peraturan yang berkaitan dengan hukuman bagi pihak yang melakukan penyimpangan dalam hal penyelewengan pinjaman, peraturan tersebut bisa dalam bentuk Perdes.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin; Fadillah Putra; Saiful Arif. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang: SIC
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kaloh, J.2002 (cetakan 1).*Mencari Bentuk Otonomi Daerah ( Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan lokal dan tantangan global)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Milles, Matthew B dan A. Michael Hubberman.1992, cetakan pertama. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J.2000.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubyarto.1997, cetakan pertama. *Gerakan Nasional Penanggulangan kemiskinan, kajian bersama pengembangan kebijaksanaan*.Yogyakarta:Aditya media).
- Nawawi, Hadari.2005.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nasir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: ghalia Indonesia
- Saragi P, Tumpal.2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa*.Jakarta : IRE Press.
- Sevilla, Consuelo G.1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soemarno.1996. *Ragam Wilayah Pedesaan Miskin & Upaya Pengentasannya*.Malang: Puslit PWD, UNIBRAW
- Soetrisno, Loekman. (1997) *Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syaukani; gaffar, Afan; Rasyid, Ryaas. 2003.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Artikel**

- Adiyoga; Erni Herawati.2003. *Pola Nafkah Lokal:Acuan Mengkaji Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah*. Bogor: YAE diakses pada Tanggal 18 September 2007 dari [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Agenda-agenda Pembangunan Jawa Timur Tahun 2006-2008.”RPJMD Jawa Timur Tahun 2006-2008 ”, diakses pada Tanggal 20 Juli 2007 dari <http://www.jatim.go.id/rpjmd2006/babiii/pdf>
- Bappenas.2004.*Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Di akses dari [www.bappenas.go.id index.php module](http://www.bappenas.go.id/index.php/module) pada 20 Juli 2007.
- Mubyarto. 2002. *Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta. diakses pada Tanggal 18 September 2007 dari [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- \_\_\_\_\_. 2002. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta. diakses pada Tanggal 18 September 2007 dari [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Muchtar .2003.*Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan*. di akses pada tgl 07 nov 2007 dari <http://www.depsos.go.id>

- Mulayadi.2005.Pembangunan Masyarakat, di akses pada tgl 07 nov 2007 dari <http://www.mail-archive.com>
- Narhetali, Erita.2003. *Kemiskinan yang berekelanjutan*, diakses pada tanggal 7 Nopember 2007 dari <http://www.kompas.com>
- Ragnar Nurkse.1953. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat (Memahami Kemiskinan)*. diakses pada tanggal 04 Mei 2007 dari [www.scn.org/mpfc/index.htm](http://www.scn.org/mpfc/index.htm)
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa. Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*. STPM "APMD", Yogyakarta: Disertai yang tidak dipublikasikan.diakses pada tanggal 11 Juli 2007 dari [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS .diakses pada tanggal 04 Mei 2007 dari <http://www.makindo.com>
- \_\_\_\_\_. 2004. "Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi" bahan bacaan pelatih dalam meningkatkan kemampuan (*capacity building*) para pendamping sosial keluarga miskin pada proyek ujicoba model Pemandu di Lampung, Jateng dan NTB diakses pada tanggal 04 Mei 2007 dari <http://www.makindo.com>
- Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. *Kemiskinan*. Diakses <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> di akses pada 4 Juli 2007
- <http://www.kabblitar.go.id/>
- [www.gerdutaskin.multiply.com](http://www.gerdutaskin.multiply.com)

### **Undang-undang**

Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



## Pedoman Wawancara

### Informan :

1. Pengurus UPK (Unit pengelola Keuangan) Gerdu-Taskin Desa Plandirejo
  - a. Bapak Gazzali Mustafa selaku Ketua UPK
  - b. Bapak Siswandi selaku Bendahara UPK
2. Pokmas (Kelompok Masyarakat)
  - a. Ibu Hartini (42 tahun) warga Dusun Ngadirejo.
  - b. Ibu Suyayuk (37 tahun) warga Dusun Wonorejo.
  - c. Ibu Binti Sulikah (28 tahun) warga Dusun Sidorejo.

### Topik Wawancara :

1. Kepada anggota UPK (Unit Pengelola Keuangan ) program Gerdu-Taskin di Desa.
  - a. Tempat dan anggota yang hadir dalam pembentukan UPK Gerdu-Taskin Desa Plandirejo
  - b. Dana oerasional UPK Gerdu-Taskin Desa Plandirejo
  - c. Wewenang UPK Gerdu-Taskin Desa Plandirejo
  - d. Jumlah RTM, pengkategorian RTM, dan atas dasar apa sebuah keluarga dapat dimasukkan dalam kategori tertentu.
  - e. Pada kegiatan pemberdayaan usaha, siapa yang menjadi sasaran untuk bisa meminjam dan siapa yang berhasil melakukan pinjaman.
  - f. Kegunaan memberikan pinjaman kepada masyarakat.
  - g. Dana yang telah cair untuk pemberdayaan usaha kegiatan usaha simpan pinjam.
  - h. Sistem yang diterapkan dalam memberikan pinjaman dan apakah sesuai dengan pedoman dari Propinsi.
  - i. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam rangka menyukseskan lembaga dan program Gerdu-Taskin
  - j. Hambatan yang paling berarti dalam urusan seluruh kegiatan di UPK.

2. Kepada kelompok masyarakat/RTM (beberapa Rumah Tangga Miskin) yang memperoleh pinjaman.
  - a. Jumlah anak yang dimiliki
  - b. Rata-rata pendapatan per bulan
  - c. Yang menjadi beban tanggungan keluarga bapak/ibu.
  - d. Pengetahuan Informasi mengenai Gerdu-Taskin
  - e. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program Gerdu-Taskin.
  - f. Alasan melakukan pinjaman.
  - g. Pandangan tentang uang pinjaman.
  - h. Hambatan dalam pengembalian.
  - i. Perubahan setelah mendapat pinjaman
  - j. Perbedaan yang dirasakan antara sebelum dan sesudah menerima pinjaman.



UNIT PENGELOLA KEUANGAN  
PROGRAM GERDU-TASKIN TAHUN 2004  
Desa Plandirejo-Kecamatan Bakung-Kabupaten Blitar

Nomor : 025/UPK/03/2008

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang

Di

Malang

Berdasarkan Surat Dekan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor :  
6951/J.10/1.14/PG/2007 tertanggal November 2007 bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Mafrikhatul K. Nisa

NIM : 0410310076

Alamat : RT 03 RW 01 Ds. Ploso – Selopuro \_ Blitar

Telah menyelesaikan riset dengan tema **Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan  
Kemiskinan ( Gerdu – Taskin ) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat .**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blitar, 02 Maret 2008

Unit Pengelola Keuangan

Gerdu – Taskin

Ketua



(Gazzali Mustofa )

**CURRICULUM VITAE**

**Nama** : Mafrikhatul K. Nisa  
**NIM** : 0410310076  
**Tempat dan Tanggal Lahir** : Blitar, 29 April 1985  
**Alamat** : JL Mayjend Panjaitan No.207 Malang  
**Pendidikan Formal** :

- |  |      |             |      |
|--|------|-------------|------|
| 1. SDN. Ploso I  | 1992 | Tamat tahun | 1998 |
| 2. MTsN Jambewangi                                     | 1998 | Tamat tahun | 2001 |
| 3. SMA Negeri I Talun                                  | 2001 | Tamat tahun | 2004 |
| 4. Fakultas Ilmu Administrasi<br>Universitas Brawijaya | 2004 | Tamat tahun | 2008 |

**Karya Ilmiah**

1. Pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar), diajukan untuk memenuhi syarat ujian Sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2008